



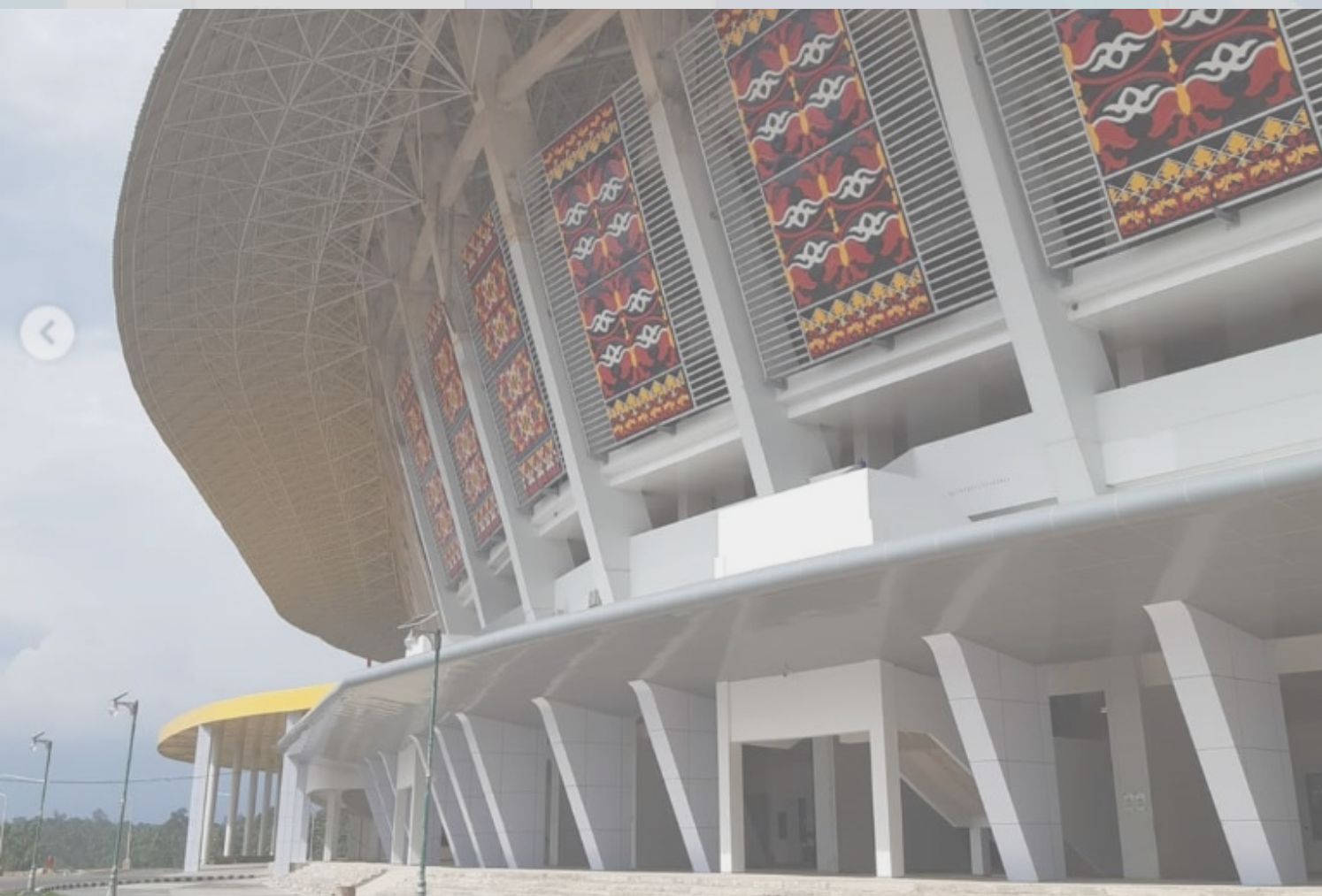
PROVINSI SUMATERA BARAT

# RENCANA STRATEGIS

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

TAHUN 2021 - 2026

KEDALAMAN LAUT	
0	2500
100	3000
500	4500



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021– 2026, disusun berdasarkan PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan PRJPD, RPJMD dan RKPD.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan acuan umum rencana dan kegiatan lingkup Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang.

Dengan demikian diharapkan semua pihak yang terkait dengan pelayanan infrastruktur terdapat kesepahaman dalam mewujudkan infrastruktur jalan, penyelenggaraan bidang keciptakaryaan, dan tata ruang. Diharapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang ini bermanfaat bagi kita.

Padang, Oktober 2021

Kepala Dinas



**Dr. Athol Bari, M.Sc.Eng**

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19640515 199003 1 010

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>	
<b>BAB I</b> Pendahuluan.....	<b>1</b>	
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum.....	4
1.3	Maksud dan Tujuan.....	8
1.3.1	Maksud.....	8
1.3.2	Tujuan.....	9
1.4	Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II</b> Gambaran Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	<b>13</b>	
2.1	Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.....	13
2.1.1	Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.....	13
2.1.2	Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	14
2.1.3	Uraian Tugas Dan Fungsi Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	17
2.2	Sumber Daya.....	23
2.2.1	Sumber Daya Manusia (SDM).....	23
2.2.2	Sumber Daya Non-Aparatur.....	31
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.....	61
2.4	Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	66
<b>BAB III</b> Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....	<b>68</b>	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat .....	68
3.2	Telaahan Visi, Misi Dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur.....	70
3.3	Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat .....	73
3.4	Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang.....	75
3.5	Telaahan RTRW Provinsi Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	76
3.6	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	80
<b>BAB IV</b> Tujuan dan Sasaran.....	<b>85</b>	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang .....	85
<b>BAB V</b> Strategi dan Arah Kebijakan.....	<b>89</b>	
<b>BAB VI</b> Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	<b>92</b>	
6.1	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang .....	92
6.2	Indikator Kinerja .....	105
6.3	Pendanaan Indikatif .....	106
<b>BAB VII</b> Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	<b>107</b>	
<b>BAB VIII</b> Penutup .....	<b>109</b>	
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>v</b>	

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021– 2026, disusun berdasarkan PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan PRJPD, RPJMD dan RKPD.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan acuan umum rencana dan kegiatan lingkup Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang.

Dengan demikian diharapkan semua pihak yang terkait dengan pelayanan infrastruktur terdapat kesepahaman dalam mewujudkan infrastruktur jalan, penyelenggaraan bidang keciptakarya, dan tata ruang. Diharapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang ini bermanfaat bagi kita.

Padang, Oktober 2021

Kepala Dinas



**Dr. Athol Bari, M.Sc.Eng**

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19640515 199003 1 010

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra OPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.....	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang.....	16
Gambar 2.2	Diagram Proporsi Pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2020.....	24
Gambar 2.3	Grafik Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2020 berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	26
Gambar 2.4	Grafik Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang berdasarkan Golongan Tahun 2020.....	27
Gambar 3. 1	Struktur Ruang berdasarkan Perda RTRW Nomor 13 tahun 2012.....	77
Gambar 3. 2	Rencana Pola Ruang Pada RTRW Provinsi Sumatera Barat.....	80

## DAFTAR TABEL

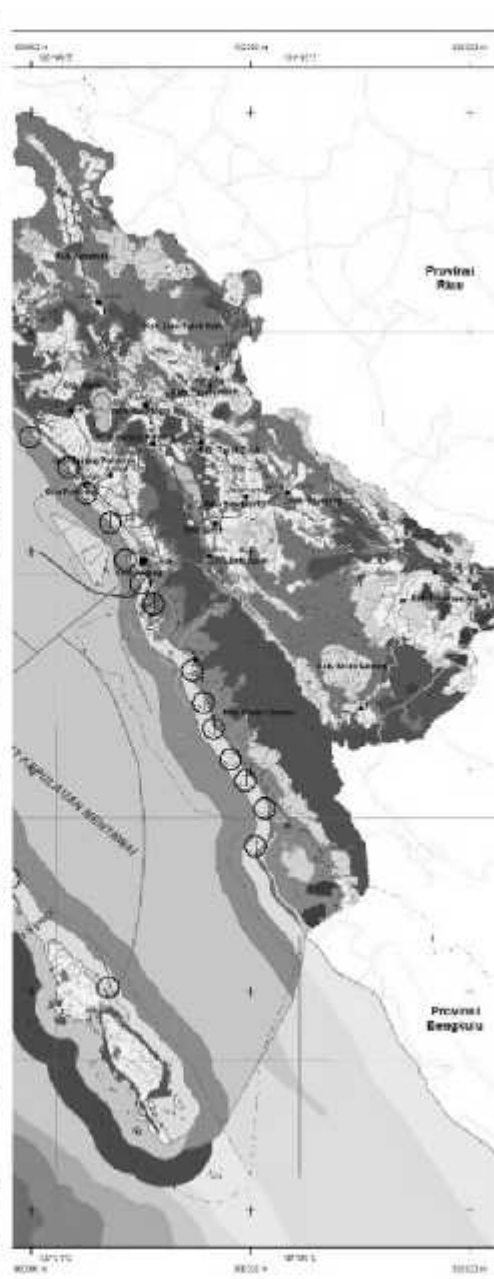
Tabel 2.1	Rincian Pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Berdasarkan Jenis Kelamin.....	24
Tabel 2.2	Rincian Pegawai.....	24
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Tahun 2020 berdasarkan tingkat pendidikan.....	25
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya Tata Ruang Berdasarkan pangkat/golongan.....	26
Tabel 2.5	Personil yang Memiliki Sertifikat Keahlian Tahun 2014, 2015 dan 2021.....	27
Tabel 2.6	Kebutuhan dan Ketersediaan Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan ABK.....	28
Tabel 2.7	Daftar Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2020	32
Tabel 2.8	Daftar Aset Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .....	33
Tabel 2.9	Daftar Aset UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.....	38
Tabel 2.10	Daftar Aset UPTD Workshop dan Peralatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.....	52
Tabel 2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2016 - 2020 Provinsi Sumatera Barat.....	62
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2020.....	63
Tabel 2.13	Kekuatan dan Kelemahan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	66
Tabel 2.14	Tantangan dan Peluang Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	67
Tabel 3.1	Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.....	69
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Terhadap Pencapaian Visi Misi Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2021 - 2026	72
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Renstra Kementerian PUPR beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	74
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Renstra Kementerian ATR-BPN.....	76
Tabel 3.5	Ruas Jalan Provinsi Berdasarkan SK Gubernur Sumbar. No: 600-903.1-2015 Tgl 18 Desember 2015.....	77
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.....	87
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	90
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.....	93
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	108

# BAB I

# PENDAHULUAN

---

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD).

Rencana Strategis (Renstra) PD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah PD yang berfungsi untuk menterjemahkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Selain itu, Renstra PD juga harus memuat sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Renstra memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan perubahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah menyebutkan bahwa Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas



pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Hal inilah yang kemudian tertuang dalam Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2021-2026. Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi.

Proses penyusunan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 –2026 dilakukan melalui tahapan :

- a. Persiapan Penyusunan ;
- b. Penyusunan Rancangan Awal ;
- c. Penyusunan Rancangan ;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah ;
- e. Perumusan Rancangan Akhir ;
- f. Penetapan Renstra

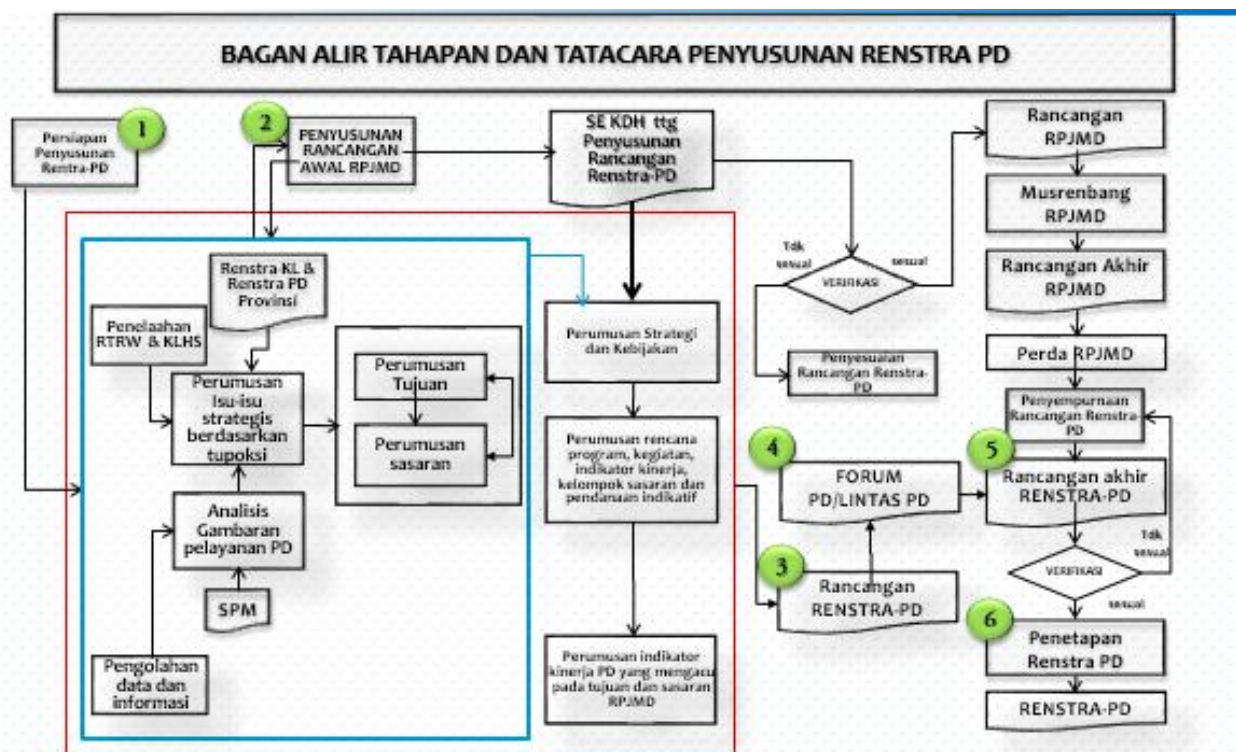
Secara rinci penyusunan dokumen Renstra dilakukan dengan melalui serangkaian kegiatan yang terdiri dari:

1. Pengolahan data dan informasi
  - a. Data dan informasi gambaran pelayanan OPD; mencakup (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan OPD; (2) data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya; (3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam lingkup kewenangan OPD.
  - b. Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan OPD: mencakup (1) data pendapatan OPD; dan (2) data belanja OPD.
2. Analisis gambaran pelayanan OPD, terdiri dari:
  - a. Analisis gambaran umum pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan OPD;
  - b. Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD.
3. *Review* Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) yang mencakup:

- a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR);
- b. Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup:
  - a. Tujuan dan sasaran RTRW;
  - b. Struktur dan pola ruang;
  - c. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi OPD.
6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan:
  - a. Hasil analisis gambaran pelayanan OPD (potensi dan permasalahan pelayanan OPD);
  - b. Hasil review Renstra K/L;
  - c. Hasil penelaahan RTRW;
  - d. Hasil analisis dokumen KLHS;
  - e. Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD;
7. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPD; dan
8. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD.

Adapun Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas BMCKTR Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, seperti ditampilkan pada Gambar 1.1

**Gambar 1. 1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra OPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**



Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat dari bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
29. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
30. Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
31. Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
32. Instruksi Presiden No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan atas Permendagri 13/2006;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
41. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 178);
44. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 127);
45. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

46. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026
47. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Nomor 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038;
48. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
49. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
50. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;
51. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud :

- a. Menjabarkan Visi Misi Kepala Daerah dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;
- b. Memberikan arah pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026.
- c. Sebagai dokumen induk perencanaan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
- d. Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi daerah pada saat itu.
- e. Sebagai pedoman perencanaan dan alat kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi

Sumatera Barat yang memuat pokok-pokok kebijakan dan pokok-pokok program dan kegiatan pembangunan.

### 1.3.2 Tujuan

Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat secara nyata ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
4. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang efektif dan efisien.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### 1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat serta pedoman yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.



### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

Bab ini berisi informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat ini.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
- 2.2 Sumber Daya Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program gubernur, telaahan rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Telaah RTRW dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis.

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Dalam hal ini kementerian terkait adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### 4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

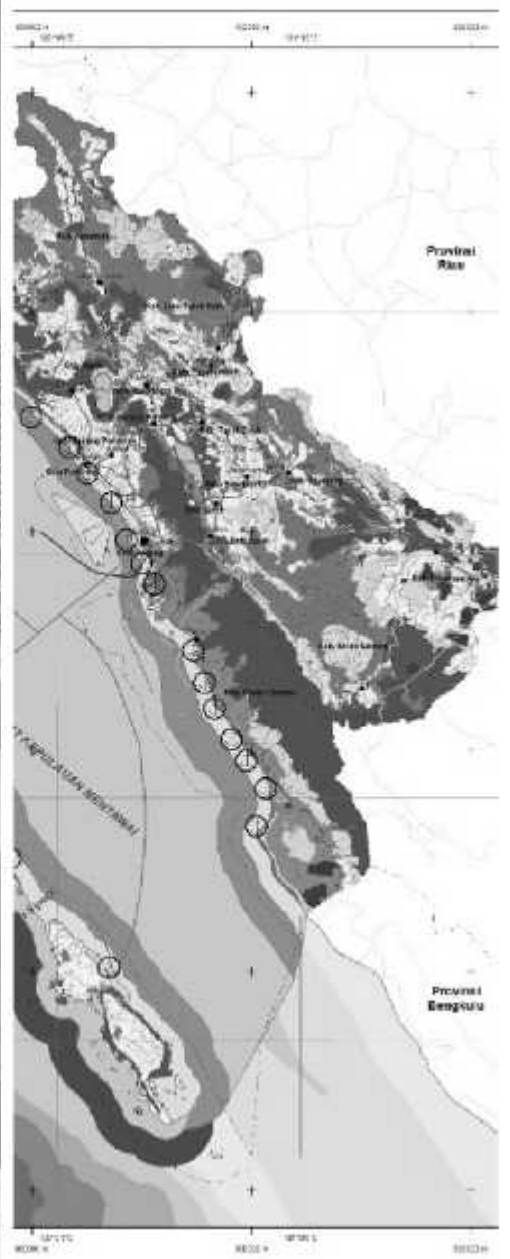
Bab ini memuat kesimpulan serta harapan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

# BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN DINAS

---

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT

### 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang atau disingkat dengan Dinas BMCKTR adalah perubahan nama dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang lahir melalui Perda Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 23 Desember 2019. Sedangkan Pengukuhan nama Dinas BMCKTR serta pelantikan pejabat terkait dilakukan pada tanggal 21 Mei 2021.

Sebelum berganti nama menjadi Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), dahulunya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan salah satu OPD pecahan dari Dinas Prasjal Tarkim yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera tanggal 1 November 2016.

Sebelum berganti nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dahulunya adalah Dinas Prasjal Tarkim. Pada tahun 2017 Dinas Prasjal Tarkim ini terpecah menjadi 2 (dua) dinas yaitu dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan dinas Perkimtan.

#### 2.1.1 Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan perubahan nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang lahir melalui Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Barat. Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2020 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, urusan wajib pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang meliputi :

1. Urusan Pekerjaan Umum; dan
2. Urusan Penataan Ruang

### **A. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 03 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah pada pasal 59 dinyatakan bahwa Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.

### **B. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut diatas Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

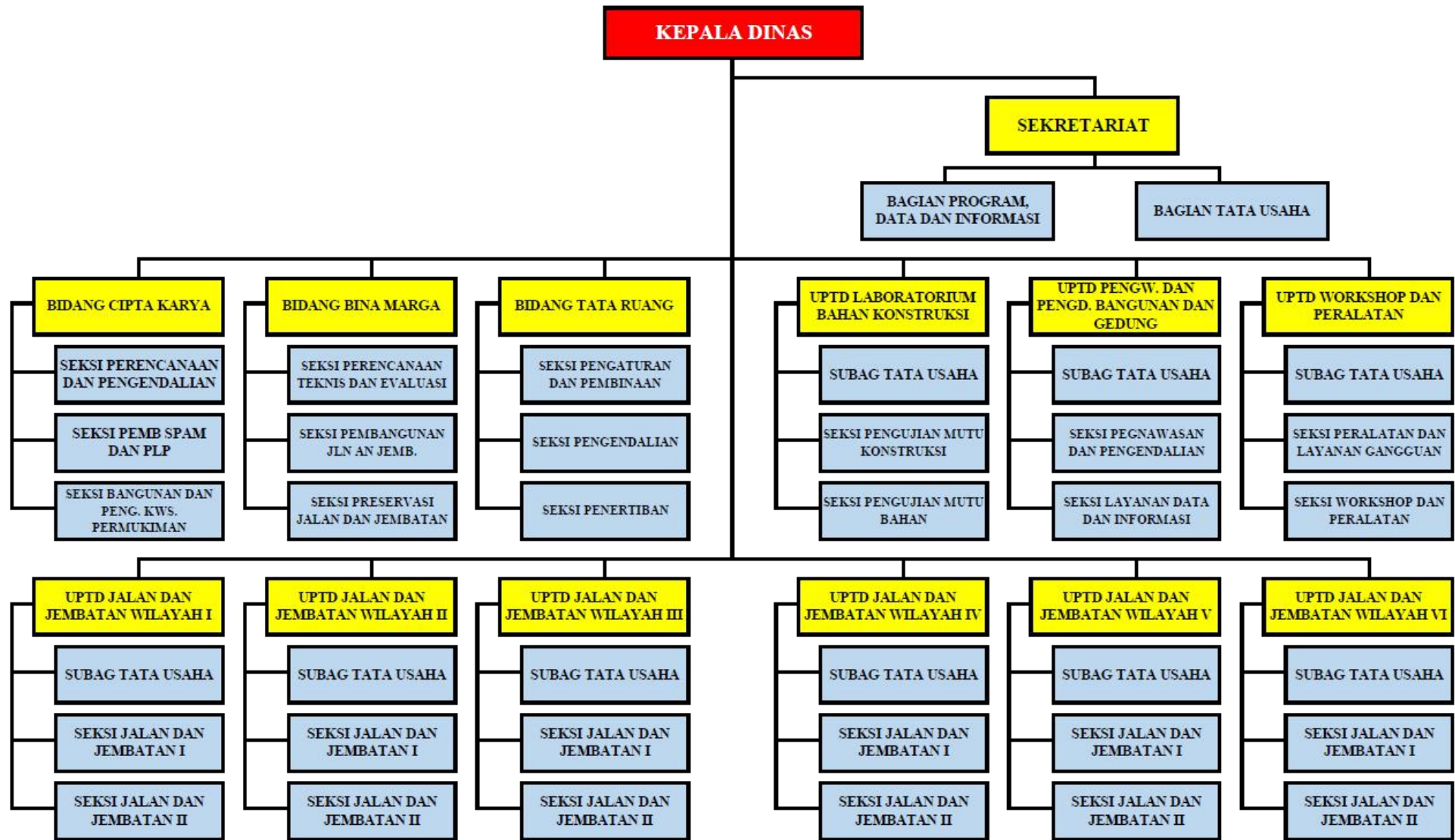
- a. penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang); dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 tahun 2020 (pasal 8), susunan organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Program, Data dan Informasi; dan
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
3. Bidang Cipta Karya, membawahi :
  - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
  - b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman ; dan
  - c. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
4. Bidang Bina Marga, membawahi :
  - a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
  - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
  - c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Tata Ruang, membawahi :
  - a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
  - b. Seksi Pengendalian Tata Ruang; dan
  - c. Seksi Penertiban Tata Ruang.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. UPTD

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang





### 2.1.3 Uraian Tugas Dan Fungsi Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dibantu oleh Sekretariat, 3 (tiga) bidang dan 9 UPTD. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dinyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian sebagai berikut :

#### 1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis, penyelenggaraan administrasi, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan penyelenggaraan tugas lain yan diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya, dengan rincian sebagai berikut :

- Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan di Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- Menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketata usahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas, dengan rincian sebagai berikut :

- Menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas;
- Menyelenggarakan penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan di lingkungan Dinas;
- Menyelenggarakan pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian;
- Menyelenggarakan pengelolaan tata kearsipan, urusan kerumahtanggaan Dinas, ketatausahaan dan humas rumah tangga Dinas;
- Menyelenggarakan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Dinas;
- Menyelenggarakan pengelolaan dan penataan barang milik daerah;
- Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Menyelenggarakan pengelolaan data, informasi publik dan dokumentasi berbasis komputerisasi/ web;
- Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **a. Sub Bagian Program, Data dan Informasi;**

Sub Bagian Program, Data dan Informasi memiliki fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Program, Data dan Informasi; dan
- Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan bidang Program, Data dan Informasi di lingkungan Dinas.

### **b. Sub Bagian Tata Usaha;**

Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi sebagai berikut :

- pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Usaha; dan
- Pelaksanaan dan penyusunan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha di lingkungan Dinas.

### 3) Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, program pekerjaan, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan/ jembatan, pengamanan bagian - bagian jalan/ jembatan, pengawasan/ pengendalian mutu dan hasil pekerjaan serta penyediaan pengujian dan peralatan, dengan rincian sebagai berikut :

- Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Marga;
- Menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan/ jembatan provinsi serta leger jalan/ jembatan;
- Melaksanakan kebijakan pembangunan dan preservasi jalan/ jembatan provinsi serta leger jalan/ jembatan;
- Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan penyelenggaraan pembangunan/ preservasi jalan/ jembatan;
- Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan/ preservasi jalan/ jembatan dengan kabupaten/kota;
- Melaksanakan penataan pengelolaan administrasi penyelenggaraan pembangunan dan preservasi jalan/ jembatan provinsi serta leger jalan/ jembatan;
- Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional, bantuan teknis perencanaan, rekomendasi pemberian izin utilitas pada badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan;
- Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pengujian mutu hasil konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan/ jembatan provinsi; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### a. *Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;*

Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- Pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Teknis dan Evaluasi; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Teknis dan Evaluasi.

**b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;**

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- Pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.

**c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.**

Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
- Pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan ; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.

**4) Bidang Cipta Karya**

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan bangunan gedung, penataan bangunan, dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem drainase, sistem air limbah dan persampahan regional, dengan rincian sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang cipta karya;
- Menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis pembangunan bangunan gedung, penataan bangunan/ lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, drainase, air limbah dan persampahan regional;
- Melaksanakan kebijakan pembangunan bangunan gedung, penataan bangunan/ lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, drainase, air limbah dan persampahan regional;
- Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan penyelenggaraan pembangunan keciptakaryaan;

- Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan Bidang Cipta Karya dengan kabupaten/ kota;
- Melaksanakan penataan pengelolaan administrasi penyelenggaraan pembangunan Bidang Cipta Karya;
- Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan infrastruktur Bidang Cipta Karya pada kawasan strategis provinsi;
- Menyelenggarakan pemberian bantuan teknis terhadap perangkat daerah yang melakukan pembangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
- Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan rumah negara;
- Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bangunan gedung, penataan bangunan/ lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, drainase, air limbah dan persampahan regional; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian**

Seksi Perencanaan dan Pengendalian memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pengendalian;
- Pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pengendalian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pengendalian;

**b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman**

Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman memiliki fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- Pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman.

**c. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**

Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman memiliki fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- Pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

**5) Bidang Tata Ruang**

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan pengaturan, perencanaan, pemanfaatan dan pembinaan bidang Tata Ruang sesuai kewenangan pemerintah provinsi, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan program kerja anggaran dan rumusan kebijakan bidang Tata Ruang;
- Menyelenggarakan penyiapan bahan rumusan perencanaan teknis pengaturan, perencanaan, pemanfaatan dan pembinaan bidang Tata Ruang sesuai kewenangan pemerintah provinsi;
- Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pengaturan, perencanaan, pemanfaatan dan pembinaan bidang Tata Ruang sesuai kewenangan pemerintah daerah;
- Melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengaturan, perencanaan, pemanfaatan dan pembinaan bidang Tata Ruang sesuai kewenangan daerah;
- Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan penyelenggaraan kebijakan bidang Tata Ruang;
- Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dengan kab/kota atas penyelenggaraan kebijakan bidang Tata Ruang;
- Melaksanakan penataan pengelolaan administrasi penyelenggaraan kebijakan bidang Tata Ruang;
- Menyelenggarakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan penetapan Perdanya;

- Menyelenggarakan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Peraturan Zonasi serta penetapan Perdanya; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang**

Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- Pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.

**b. Seksi Pengendalian Tata Ruang**

Seksi Pengendalian Tata Ruang memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Tata Ruang;
- Pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Tata Ruang; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Tata Ruang.

**c. Seksi Penertiban Tata Ruang.**

Seksi Penertiban Tata Ruang memiliki fungsi sebagai berikut:

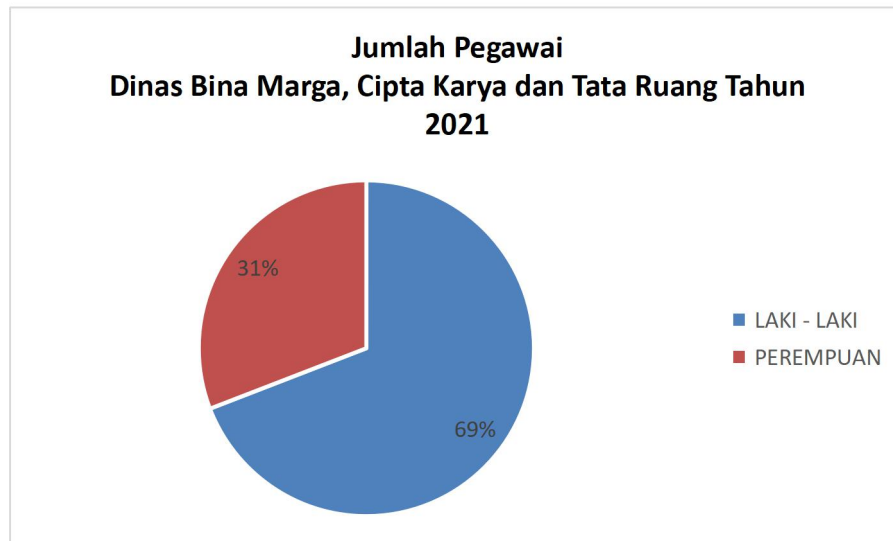
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penertiban Tata Ruang;
- Pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Penertiban Tata Ruang; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penertiban Tata Ruang.

## 2.2 Sumber Daya

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh 337 ( tiga ratus tiga puluh tujuh ) orang Pegawai Negeri Sipil (*September 2021*), dengan rincian seperti ditampilkan pada diagram dibawah ini.

**Gambar 2. 2 Diagram Proporsi Pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2021**



Data Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2021, berdasarkan Jenis Kelamin.

**Tabel 2. 1 Rincian Pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki-laki	233 orang	69.00%
Perempuan	104 orang	31.00%
Total	337 orang	100.00%

Berikut merupakan tabel rincian Pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Tahun 2016 hingga 2020.

**Tabel 2. 2 Rincian Pegawai**

No.	RINCIAN PEGAWAI	JUMLAH (Orang)				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>I.</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>504</b>	<b>404</b>	<b>368</b>	<b>351</b>	<b>354</b>
1.	Pria	372	303	274	258	245
2.	Wanita	132	101	94	93	109
<b>II.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>504</b>	<b>399</b>	<b>268</b>	<b>351</b>	<b>354</b>
1.	Pasca Sarjana (S-2)	32	36	36	36	41
2.	Sarjana (S-1)	135	146	38	146	130



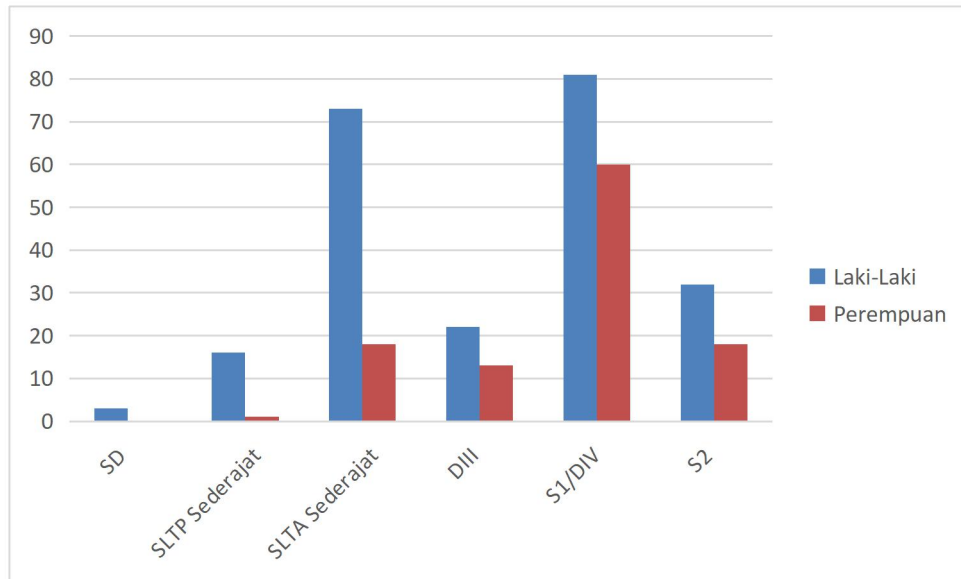
No.	RINCIAN PEGAWAI	JUMLAH (Orang)				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.	Sarjana Terapan (D-IV)	0	1	2	0	2
4.	Sarjana Muda (D-III)	39	32	26	25	25
5.	SLTA	283	148	136	127	129
6.	SLTP	10	22	20	13	21
7.	SD	5	14	10	4	6
<b>III</b>	<b>ESELON</b>	<b>39</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
1.	II	1	1	1	1	1
2.	III	10	6	7	13	13
3.	IV	28	17	20	38	38

Pemetaan pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Tahun 2021 berdasarkan tingkat pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
SD	3	0	3
SLTP Sederajat	16	1	17
SLTA Sederajat	73	18	91
DIII	22	13	35
S1/DIV	81	60	141
S2	32	18	50
Jumlah	227	110	337

**Gambar 2. 3 Grafik Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2021 berdasarkan Tingkat Pendidikan**



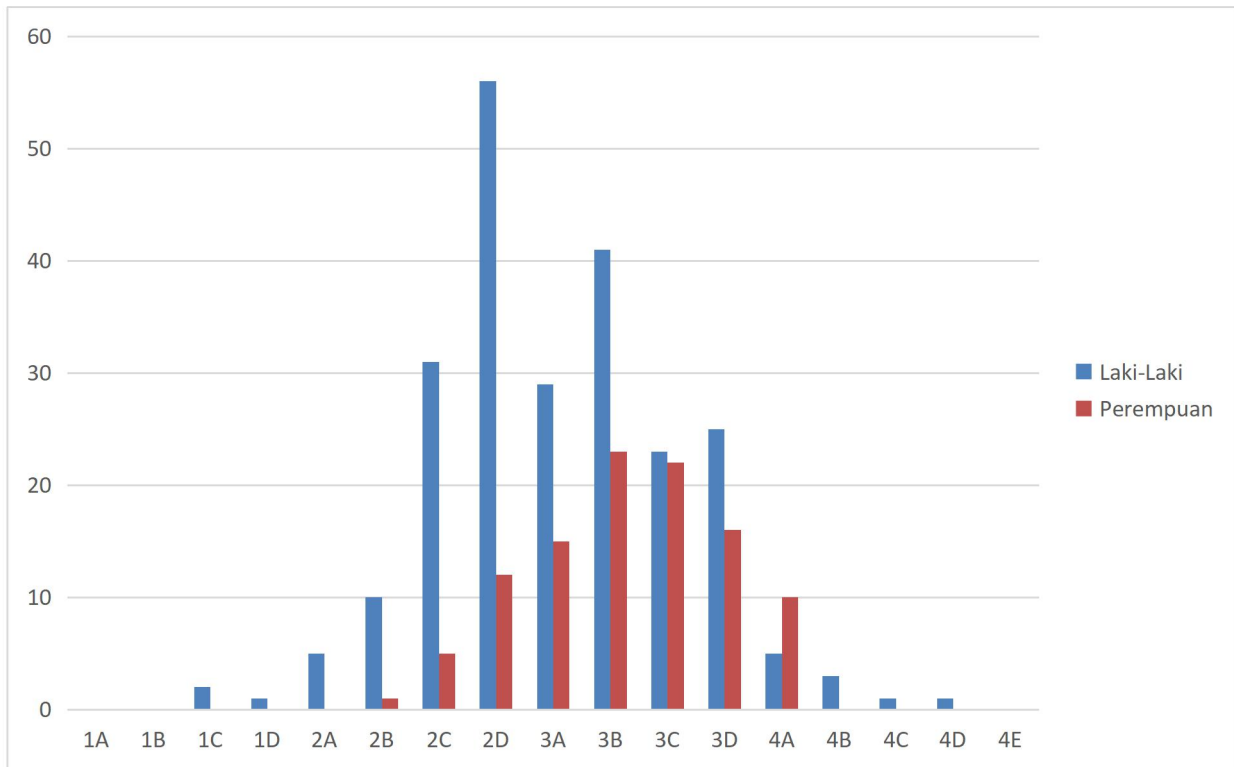
Sedangkan, pemetaan pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pangkat/golongan ditampilkan pada berikut.

**Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya Tata Ruang Berdasarkan pangkat/golongan**

Golongan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
1A	0	0	0
1b	0	0	0
1c	2	0	2
1d	1	0	1
2a	5	0	5
2b	10	1	11
2c	31	5	36
2d	56	12	68
3a	29	15	44
3b	41	23	64
3c	23	22	45
3d	25	16	41
4a	5	10	15
4b	3	0	3
4c	1	0	1
4d	1	0	1
4e	0	0	0
Total	233	104	337

Sumber : Subbag Tata Usaha Dinas BMCKTR (September 2021)

**Gambar 2. 4 Grafik Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan Golongan Tahun 2021**



Pemetaan pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan sertifikat keahlian ditampilkan pada tabel 2.5 berikut.

**Tabel 2. 5 Personil yang Memiliki Sertifikat Keahlian Tahun 2014, 2015 dan 2021**

No	Jenis Sertifikat Keahlian	Jumlah Pegawai (orang)		
		2014	2015	2021
1.	Pengadaan Barang dan Jasa	126	134	130
2.	Keahlian jalan dan jembatan	153	156	156
3.	Fungsional Teknis	168	177	177
4.	Pengujian laboratorium	17	25	25
5.	Manajemen Kebencanaan	48	53	53
6.	Pengelola Teknis Bangunan Gedung / Rumah Negara	21	21	19
7.	Brevet A dan B	68	68	74

Tabel 2.6 menunjukkan kebutuhan dan ketersediaan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

**Tabel 2. 6 Kebutuhan dan Ketersediaan Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan ABK**

No	KETERANGAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN
1	<b>KEPALA DINAS</b>	1	1
2	Teknik Jalan dan Jembatan Madya	2	1
3	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya	2	0
4	Penata Ruang Madya	2	0
5	Penyehatan Lingkungan Madya	1	0
6	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	3	0
7	Teknik Jalan dan Jembatan Muda	3	0
8	Penata Ruang Muda	3	2
9	Penyehatan Lingkungan Muda	3	0
10	<b>SEKRETARIS</b>	1	1
12	<b>KEPALA SUB BAGIAN</b>	11	9
13	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	4	4
14	Bendahara	2	2
15	Penyusun Laporan Keuangan	1	1
16	Pengelola Barang Milik Negara	4	4
17	Pranata Kearsipan	2	2
18	Verifikator Keuangan	10	10
19	Pengelola Gaji	1	1
20	Pengelola Keuangan	29	29
21	Sekretaris (Pimpinan)	1	0
22	Pengolah Data	1	0
23	Pengelola Teknologi Informasi	1	0
24	Pengadministrasian Persuratan	1	0
25	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	11	11
26	Pengadministrasian Umum	42	37
27	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	6	4
28	Penyusun Bahan Informasi dan Publik	1	1

No	KETERANGAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN
29	<b>KEPALA BIDANG</b>	3	3
30	KEPALA SEKSI	27	23
31	Jafung Teknik Jalan dan Jembatan PERTAMA	6	5
32	Analisis Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	5	5
33	Pemeriksa Jalan dan Jembatan	1	1
34	Penelaah Pengelola Leger Jalan	2	2
35	Pengelola Sistem Jaringan Jalan	2	2
36	Pengelola Pembinaan Pembangunan	5	3
37	Pengawas Jalan dan Jembatan	30	28
38	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	3	3
39	Pengelola Pembangunan dan Pemel. Jembatan	4	4
40	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	12	11
41	Pengawas Jaringan utilitas	1	1
42	Pengelola Pemelihara Jalan	1	1
43	Jafung Teknik Tata Bang. dan Perumahan PERTAMA	4	3
44	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	8	7
45	Pengawas Bangunan dan Gedung	10	6
46	Jafung Teknik Penyehatan Lingkungan PERTAMA	2	1
47	Analisis Sumber Daya Air	2	1
48	Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman	2	2
49	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	2	2
50	Penata Bangunan dan Permukiman	1	1
51	Analisis Pengembangan Infrastruktur	2	2
52	Pengelola Geologi, Tata Lingkungan dan Air Bawah Tanah	3	3
53	Pengelola Perencana Teknis Tata Bangunan	1	1
55	JAFUNG PENATA RUANG PERTAMA	6	3
56	Analisis Pengembangan Wilayah	1	0
57	Analisis Tata Ruang	2	2
58	Penyusun Rencana Tata Ruang	1	0

No	KETERANGAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN
59	Pengelola Tata Ruang	1	0
60	Pengelola Geospasial	3	0
61	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	3	1
62	Pengawas Tata Ruang	4	3
63	<b>KEPALA UPTD</b>	9	8
64	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	1	1
65	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	2	0
66	Pengadm. Sistem Info. Pengendalian Pemb.	1	0
67	Pengadministrasian Keuangan	2	2
68	Penelaah Mutu Konstruksi	2	2
69	Penguji Labor. Tanah, Aspal dan Beton	4	3
70	Penguji Bahan Bangunan	1	1
71	Pengelola Sampel Pengujian	3	2
72	Teknisi Laboratorium	2	0
73	Analisis sistem Mutu dan Lingkungan	1	1
74	Penelaah Bahan Jalan	1	1
75	Penguji Bahan Bangunan	1	2
76	Pengelola Sampel Pengujian	1	1
77	Teknisi Laboratorium	2	0
78	Analisis Infrastruktur	1	1
79	Pengelola Rencana Pek. Umum & Perumahan	2	2
80	Operator Alat Berat	15	9
81	Pengawas Pengoperasian Alat Berat	2	2
82	Pemelihara Peralatan	3	1
83	Pengelola Pemeliharaan Jalan	12	11
84	Pemelihara Jalan	52	37

### 2.2.2 Sumber Daya Non-Aparatur

1) Asset

Sumber Daya Non-Aparatur yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Asset yang berupa sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas.

OPD : DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
 PROVINSI : SUMATERA BARAT

Tabel 2. 7 Daftar Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2020

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 PROPINSI : SUMATERA BARAT


KODE LOKASI : 11.01.13.00.101031.00000.00000.xxxx

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS (NILAI BUKU)

No Urut	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG		NILAI PEROLEHAN ( Rp. )	AKUMULASI PENYUSUTAN ( Rp. )	NILAI BUKU ( Rp. )	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2020 ( Rp. )
				PERSIL	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01		<b>GOLONGAN TANAH</b>			446.576.523.822,06	0,00	446.576.523.822,06	0,00
		01	TANAH	75	12.320.378	446.576.523.822,06	0,00	446.576.523.822,06	0,00
2	02		<b>GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN</b>			85.886.151.041,60	63.227.351.741,91	22.658.799.299,69	6.469.840.703,39
		02	ALAT-ALAT BESAR	-	90	44.887.866.189,00	30.857.635.738,69	14.030.230.450,31	3.669.002.500,26
		03	ALAT-ALAT ANGKUTAN	-	49	10.452.816.236,00	7.117.669.236,00	3.335.147.000,00	868.566.625,00
		04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	193	3.301.699.469,60	1.452.990.750,72	1.848.708.718,88	446.765.719,76
		06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	-	1.875	18.781.545.186,87	16.269.247.509,17	2.512.297.677,69	1.064.593.600,92
		07	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	-	73	1.092.680.835,00	931.975.624,00	160.705.211,00	69.364.747,00
		09	ALAT LABORATORIUM	-	141	7.369.543.125,14	6.597.832.883,33	771.710.241,80	351.547.510,45
3	03		<b>GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN</b>			115.522.701.190,00	17.712.793.827,99	97.809.907.362,02	2.332.985.616,61
		11	BANGUNAN GEDUNG	61	6.797	115.522.701.190,00	17.712.793.827,99	97.809.907.362,02	2.332.985.616,61
4	04		<b>GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARIN</b>			3.820.841.120.961,96	3.298.760.304.383,62	522.080.816.578,34	110.168.357.936,76
		13	JALAN DAN JEMBATAN	-	117.526.943.182	3.817.231.310.961,96	3.298.399.323.383,62	518.831.987.578,34	110.048.030.936,76
		14	BANGUNAN AIR/IRIGASI	-	-	3.609.810.000,00	360.981.000,00	3.248.829.000,00	120.327.000,00
5	05		<b>GOLONGAN ASET TETAP LAINYA</b>			14.828.523.945,36	12.636.245.952,19	2.192.277.993,17	1.805.177.993,17
		20	ASET TETAP RENOVASI	-	5	14.828.523.945,36	12.636.245.952,19	2.192.277.993,17	1.805.177.993,17
6	06		<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>			575.418.643.740,00	0,00	575.418.643.740,00	0,00
		00	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	43	15.587	575.418.643.740,00	0,00	575.418.643.740,00	0,00
<b>TOTAL HARGA</b>						5.059.073.664.700,98	3.392.336.695.905,71	1.666.736.968.795,28	120.776.362.249,93
<b>DIBULATKAN</b>						5.059.073.664.701	3.392.336.695.906	1.666.736.968.795	120.776.362.250

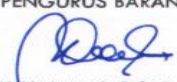
*Terbilang : Satu Triliun Enam Ratus Enam Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*

MENGETAHUI  
 KEPALA DINAS



( Ir. FATHOL BARI, M.Sc.Eng - )  
 NIP. 19640515 199003 1 010

31 Desember 2020  
 PENGURUS BARANG



( MUHAMMAD DONI, ST. )  
 NIP. 19820716 200604 1 004



Tabel 2. 8 Daftar Aset Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

INFORMASI DATA BANGUNAN			UMUR dan BOBOT				
No.	Jenis Barang>Nama Barang	TH.	Umur Awal	+ Umur	Bobot	Sisa Umur Per tahun 2020	Umur Akhir
1	Bangunan Mushalla Bukittinggi	2018	50	0	0%	47	
2	Penym. Shelter Evakuasi Tsunami SMA 1 Sutra Pessel	2017	50	0	0%	46	
3	Rumah Dinas Kepala Dinas PU	2019	50	0	0%	48	
4	Bangunan Rumah Dinas 1 Pariaman	2018	50	0	0%	47	
5	Bangunan Rumah Dinas 2 Pariaman	2018	50	0	0%	47	
6	Bangunan Rumah Dinas 4 Pariaman	2018	50	0	0%	49	
7	Pembangunan Gedung Kantor Samsat Kota Padang	2020	50	0	0%	49	
8	Rehab Kantor Kwarda 03 Sumbar	2016	50	0	0%	45	
9	Perbaikan Kantor KONI Sumatera Barat	2015	50	0	0%	44	
10	Rehab Kantor Lemdadika Lubuk Kilangan	2016	50	0	0%	45	
11	Rehab Gedung LKKS	2016	50	0	0%	45	
12	Bangunan Rumah Dinas 3 Pariaman	2018	50	0	0%	47	
13	Kon Jrg Air Kotor (Pnk Persampahan TPA Kab. Solok)	2009	50	0	0%	38	
14	Bangunan Kantor 3 (Kantor BIC) Jl. Arau 82	2004	50	0	0%	33	

15	Bengkel Alkal	1979	50	0	0%	33	
16	Bangunan Gedung Kantor 3 Painan	1992	50	0	0%	21	
17	Bangunan Aula Lb. Sikaping	1992	50	0	0%	21	
18	Mushalla Arau 82 Pdg	1990	50	0	0%	19	
19	Gudang II Alkal	1979	50	0	0%	8	
20	Gudang I Alkal	1979	50	0	0%	8	
21	Bangunan Rumah Negeri Payakumbuh	1953	50	0	0%	0	
22	Bangunan Rumah Tinggal Arau 82 Pdg	1990	50	0	0%	19	
23	Kantor 2 Wil. Painan	1986	50	0	0%	15	
24	Kantor 1 Wil. Painan	1992	50	0	0%	26	
-	Plang Tanah Bangunan Kantor	2016	5	0	0%	0	0
25	Kantor Solok	1994	50	0	0%	23	
-	Plang Tanah Bangunan Kantor	2016	5	0	0%	0	0
26	Gudang 1 Arau 82 Pdg	1980	50	0	0%	43	
27	Gudang 2 Arau 82 Pdg	1990	50	0	0%	19	
28	Kantor Bidang Peralatan&Bahan Alkal	1979	50	0	0%	23	
29	Bangunan Bengkel Lb. Sikaping	1988	50	0	0%	17	

30	Kantor 1 Lb. Sikaping	1982	50	0	0%	11	
-	Plang Tanah Bangunan Kantor	2016	5	0	0%	0	0
31	Bangunan Mushalla	2014	50	0	0%	43	
32	Kantor 1 Payakumbuh	1984	50	0	0%	28	
-	Plang Tanah Bangunan Kantor	2016	5	0	0%	0	0
33	Kantor 1 Wil. Bukittinggi	2005	50	0	0%	39	
34	Kantor 2 Wil. Bukittinggi	2005	50	0	0%	34	
35	Kantor Pdg Pjg - Tanah Datar	1950	50	0	0%	0	
36	Kantor Pariaman	1994	50	0	0%	23	
-	Plang Tanah Bangunan Kantor	2016	5	0	0%	0	0
37	Kantor Sijunjung	1992	50	0	0%	21	
-	Plang Tanah Bangunan Kantor	2016	5	0	0%	0	0
38	Pos Jaga Kantor Utama	2014	50	0	0%	43	
39	Kantor Utama Dinas Prاسjal Tarkim	2012	50	0	0%	41	
-	Prc. Pemb. Drainase	2012	50	0	0%	40	10
-	Halaman dan Parkir	2014	50	0	0%	42	8
-	Instalasi Air Kotor	2014	50	0	0%	42	8

-	Instalasi Air Bersih	2014	50	0	0%	42	8
-	Instalasi Telephone /	2014	50	0	0%	42	8
-	Instalasi Elektrikal	2014	50	0	0%	42	8
-	Hydrant & Instalasi	2014	50	0	0%	42	8
-	Drainase Kantor Dinas Prasjal	2014	50	0	0%	42	8
-	Pembangunan Pagar Gedung	2018	50	0	0%	46	4
40	Bangunan Gedung Kantor 2 Payakumbuh	1984	50	0	0%	13	
41	Toilet Mushalla Jl. Taman Siswa	2014	50	0	0%	43	
42	Rumah Genset & Pompa Jl. Taman Siswa	2014	50	0	0%	43	
43	Master Plan Kawasan Masjid Raya	2017	50	0	0%	46	
44	Gedung UPTD 2 Lantai Jl. Taman Siswa	2014	50	0	0%	44	
45	Kantor 2 Jl. Arau 82 Pdg	1980	50	0	0%	19	
-	Plang Tanah Bangunan Kantor	2016	5	0	0%	0	0
46	Kantor 3 Wil. Lubuk Sikaping	1986	50	0	0%	15	
47	Kantor 2 Wil. Lubuk Sikaping	1986	50	0	0%	44	
48	Percontohan Rmh Thn Gempa Arau 82 Pdg	2009	50	0	0%	38	
49	Lapangan Tenis	1990	50	0	0%	19	

50	Renovasi Ruang Kantor PHJD	2020	50	0	0%	49
51	Pagar Pngmn Insinerator & Pos Satpam TPA A. Dingin	2020	50	0	0%	49
52	Pembangunan Jalan Lingkungan TPA Aia Dingin	2020	50	0	0%	49
53	Pematangan Lahan TPA Aia Dingin	2020	50	0	0%	49
54	Pemb Pngembngan Bangunan TPA Sampah Reg Payakumbuh	2020	50	0	0%	49
55	Renovasi Rumah Dinas/Mess Kantor UPTD Wil.II Pyk	2020	50	0	0%	49
56	Prc Des Int Pmel R. Kadis,I.P.,Fungsi,Sekdi s,Kabid	2020	50	0	0%	49
57	Rehabilitasi Kantor UPTD Wilayah V Sijunjung	2020	50	0	0%	49
58	Pembangunan Landscape Masjid Kantor Dinas PUPR	2020	50	0	0%	49
59	Pmbyran Sisa Pek. Pemb. Gedung Samsat Kota Padang	2020	50	0	0%	49
60	Pembangunan Guest House Gubernur	2020	50	0	0%	49
61	Pembangunan Guest House Gubernur	2020	50	0	0%	49
<b>TOTAL s/d TAHUN 2021</b>						
<b>11.948.578.951,60</b>						

**Tabel 2. 9 Daftar Aset UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

NO.	SPESIFIKASI BARANG			ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN BELI / PEROLEHAN	Kondisi Barang (B,KB, RB)
	NAMA / JENIS BARANG	MERK / TYPE	Bahan			
1	2	3	4	5	6	7
I	ASET TETAP					
B	PERALATAN DAN MESIN					
B.8	ALAT LABORATORIUM					
B.8.1	UNIT ALAT LABORATORIUM					
<i>B.8.1.1</i>	<i>ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI</i>					
	<i>UPTD BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI &amp; LINGKUNGAN</i>					
1	AAS-Atomic Absorption Spectrophotometer	Angilent / 240 FS		APBD	2015	B
2	Alat Uji Tarik Baja (Universal Tensile/Compression Machine)	Matest/H010/Italy	Baja	APBD	2016	B
3	Ammonia Portable Photometer			APBD	2015	B
4	Analitical Balance	Tsimatsu		APBD	2015	B
5	Angle Grinder	Krisbow/EG2-180S	Besi dan Plastik	APBD	2019	B
6	Atterberg Limit Manual	Wykeham Ferrance /	Besi dan Plastik	APBD	2019	B

NO.	SPESIFIKASI BARANG			ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN BELI / PEROLEHAN	Kondisi Barang (B,KB, RB)
	NAMA / JENIS BARANG	MERK / TYPE	Bahan			
1	2	3	4	5	6	7
		ControlsGroup/22-T0030				
7	Atterberg Limit Test	Control 22-T0031/F	Besi	-	2005	B
8	Automatic Asphalt Compactor 6"	-	-	APBD	2010	B
9	Biconus, Sondir	Sondir Ringan	Besi	APBD	2014	B
10	Bobor Isi Agregat	Kern/ECB 10K-3N	Besi dan Plastik	APBD	2019	B
11	Bor Mesin DOD Komplit	Toho / DO-D	Besi	APBD	2019	B
12	BW Casing 300 cm (Outside dia. 3,0 inch) ASTM A53	Indoma Asia Type ASTM A53	Baja	APBD	2017	B
13	Caping Selinder 4"	BBS/BC 404.1	Besi	APBD	2019	B
14	Carbon Steel Pipa / CSP dia. 2,5 inch	Indoma Asia Type ASTM A53	Baja	APBD	2017	B
15	CBR Lapangan	Controls/34 T0115/A Italy	Baja / Stainless Steel	APBD	2016	B
16	CBR Motorized Loading	CONTROLS / 34-T0106/A	Besi	APBD	2014	B
17	CBW 6 H TOP Loading Balance	-	Besi	-	2005	B

NO.	SPESIFIKASI BARANG			ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN BELI / PEROLEHAN	Kondisi Barang (B,KB, RB)
	NAMA / JENIS BARANG	MERK / TYPE	Bahan			
1	2	3	4	5	6	7
18	Centrifugal	-	Besi	-	2005	KB
19	Cetakan Balok	BBS / BC 401		APBD	2020	B
20	Chain Block	Winpro Type 25-1320-0215	Baja	APBD	2017	B
21	Chain Block Kap. 2 Ton	Wipro/Chain Block	Besi	APBD	2019	B
22	Chain Wrench	Rigid	Besi	APBD	2018	B
23	Cincin Uji Stability Marshall Test	-	-	APBD	2013	B
24	Cod Dry Bath Reactor	-	-	Hibah Bapedalda	2010	B
25	COD Meter and Multiparameter Photometer			APBD	2015	B
26	COD Test Tube Heater			APBD	2015	B
27	Color of Water			APBD	2015	B
28	Compression Machine 50 C 4422	-	-	APBD	2011	B
29	Compression Testing Machine	Control-Italy Type 50-C5422		APBD	2012	B
30	Concrete Cover Meter Measurement	CONTROL / 58-E6102	-	APBD	2013	B
31	Concrete Jack Hammer	Bosch GSH 27 VC	Besi dan plastic	APBD	2018	B



NO.	SPESIFIKASI BARANG			ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN BELI / PEROLEHAN	Kondisi Barang (B,KB, RB)
	NAMA / JENIS BARANG	MERK / TYPE	Bahan			
1	2	3	4	5	6	7
32	Concrete Test Hammer	CONTROLS	Besi dan Plastik	APBD	2014	B
33	Concrete Vibrator	Mikasa MGX-23	Karet, Platic dan Besi	APBD	2018	B
34	Core Drill Machine	Shibuya Type TS 132	Besi	APBD	2017	B
35	Core Drilling Machine	CONTROLS/83-C0350	Besi dan Plastik	APBD	2014	B
36	Coupling Casing Shoe	Type Head Casing NW	Besi	APBD	2018	B
37	Crack Measurement Microscope	58-C0218	Besi	-	2005	B
38	Cyanide Portable Photometer			APBD	2015	B
39	Depth Integrating Suspended Sediment	-	Besi	-	2005	B
40	Desiccator	-	-	Hibah Bapedalda	2010	B
41	Dial Indikator	Teclock/KM 121	Besi dan Plastik	APBD	2019	B
42	Diamond Bit	Whwa BW-STD	Besi	APBD	2018	RB
43	Digital Balance 6000gr x 0,1 gr	Shinkodensi	Besi	-	2004	B
44	Digital Balance 6000gr x 0,5 gr	-	Besi	-	2004	B
45	Digital Balance Kapasitas 10 KG	Kern/ECB 10K-3N	Besi dan Plastik	APBD	2019	B
46	Digital Balance Kapasitas 50 KG	Gewin/IK-YD (CS-G)	Besi dan Plastik	APBD	2019	B

NO.	SPESIFIKASI BARANG			ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN BELI / PEROLEHAN	Kondisi Barang (B,KB, RB)
	NAMA / JENIS BARANG	MERK / TYPE	Bahan			
1	2	3	4	5	6	7
47	Digital Balance Kapasitas 6,2 KG	Kern/EW 6200-2NM	Besi dan Plastik	APBD	2019	B
48	Digital Circulating Water Bath	Controls / 76 B00066/B	-	APBD	2013	B
49	Digital Thermometer	AZ INSTRUMENT / RS 232		APBD	2020	B
50	Disolved Oxygen Meter for Laboratory			APBD	2015	B
51	Disolved Oxygen Meter for Portable			APBD	2015	B
52	Dissolved Oxigen (DO Meter)	Lovibond / Sensor Cdirect Oxi 200	Besi dan Plastik	APBD	2014	B
53	Dissolved Oxygen Meter Portable	Milwaukee	-	APBD	2013	B
54	Double Core Barel	-	-	APBD	2012	B
55	Drill Road AW OD 42x ID 28 mm	Indoma Asia Type ASTM A53	Baja	APBD	2017	B
56	Drilling Mesin	Complete Engine	-	-	2008	RB
57	Drive Hammer	63.5 Kg	-	-	2008	RB
58	Drying Oven	-	-	Hibah Bapedalda	2010	RB
59	Ducktilitas Aspal	Matest / B054 Italy	Baja / Stainless Steel	APBD	2016	B

NO.	SPESIFIKASI BARANG			ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN BELI / PEROLEHAN	Kondisi Barang (B,KB, RB)
	NAMA / JENIS BARANG	MERK / TYPE	Bahan			
1	2	3	4	5	6	7
60	Dynamic Cone Penetrometer	BBS / BS 109		APBD	2020	B
61	Electro-Mechanical Sieve Shaker	CONTROLS / 15-D0410	-	APBD	2013	B
62	Electronic Analytic Balance	CONTROLS / M 214 A	Besi dan Plastik	APBD	2014	B
63	Elektronik Precision Top Loading Balance Type 11-D0630/4	11-D0630/4	-	APBD	2012	B
64	Engine Diesel	Yanmar/TF 65 (R-di)	Besi	APBD	2019	B
65	Engine Penggerak	Wipro/Chain Block	Besi	APBD	2019	B
66	Engine Penggerak	Yanmar TF 115 MR	Besi	APBD	2018	B
67	Exspand Alat Survey Jalan	PARVID	Besi dan Plastik	APBD	2014	B
68	Flash & Fire Point by Cleveland Open Up	CPN AS-270A	Besi	-	2007	RB
69	Forklif Laboratory	Westco CYSD-1	Besi	APBD	2018	B
70	Generator Set	HONDA EP 2500 CX/RRH	Besi dan Plastik	APBD	2014	B
71	Genset	Honda Type EG 6500 CXS	Besi	APBD	2017	B
72	Gerinda Batu	Bosch GWS 18 V-LI	Besi dan platic	APBD	2018	B
73	Glass Filtration Apparatus	Iwaki	Baja	APBD	2017	B

NO.	SPESIFIKASI BARANG			ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN BELI / PEROLEHAN	Kondisi Barang (B,KB, RB)
	NAMA / JENIS BARANG	MERK / TYPE	Bahan			
1	2	3	4	5	6	7
74	Hammer Test + Anvil	Duraflex/DIN20022 EN853 2SN12	Plastik	APBD	2019	B
75	Hammer Test Digital	Prosceq/Type N	Besi dan Plastik	APBD	2019	B
76	Hammer Test Manual	Matest Type N	Besi	APBD	2018	B
77	Hand Bor	CPN SE-100	Besi	-	2007	RB
78	Heater/Stirrer Aluminium Top Plate/Spinbar Set	-	-	Hibah Bapedalda	2010	RB
79	Hidrometer Analysist Test	BBS / BS 114		APBD	2020	B
80	Horizontal Water Sampler	Lokal	-	APBD	2017	B
81	Katrol	Wipro	Besi	APBD	2018	KB
82	Konus Sondir	Type ASTM D 3441	Besi	APBD	2018	RB
83	Kotak Besi Kunci Bor	Lokal	Besi	APBD	2017	B
84	Kunci Pipa 24"	Ridgid / Straight Pipe Wrench		APBD	2020	B
85	Kunci Pipa 36"	Ridgid / Straight Pipe Wrench		APBD	2020	B
86	Kunci Pipa Rigid 24"	Tool Tip Ridgid	Baja	APBD	2017	B

NO.	SPESIFIKASI BARANG			ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN BELI / PEROLEHAN	Kondisi Barang (B,KB, RB)
	NAMA / JENIS BARANG	MERK / TYPE	Bahan			
1	2	3	4	5	6	7
87	Kunci Pipa Rigid 24"	Ridgid 24"	Besi	APBD	2018	B
88	Kunci Pipa Rigid 26"	Ridgid 26"	Besi	APBD	2018	B
89	Kunci Pipa Rigid 36"	Tool Tip Ridgid	Baja	APBD	2017	B
90	Laser Distance	Kapro/377	Plastik	APBD	2019	B
91	Liquid Limit Device/Atterberg Limit	CONTROLS / 22-T0031/F	-	APBD	2013	B
92	Magnetic Mini Stirrers			APBD	2015	KB
93	Manometer 250 Kg/cm <sup>2</sup>	Armatherm	Besi dan Plastik	APBD	2014	RB
94	Manometer 600 Kg/cm <sup>2</sup>	Armatherm	Besi dan Plastik	APBD	2014	RB
95	Marsal Stability Compaction Mould	BBS / BB 510.2	-	APBD	2013	KB
96	Marshal Test Set	CPN AS-500	Besi	-	2007	RB
97	Marshall Test Set 6"	-	-	APBD	2010	KB
98	Mata Coredrill dia. 2,5 inch	Lokal	Baja	APBD	2017	RB
99	Melting Pot	CONTROLS/55-D1403	Besi dan Plastik	APBD	2014	B
100	Mesin Bor	Toho D0D	Besi	APBD	2018	B

NO.	SPESIFIKASI BARANG			ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN BELI / PEROLEHAN	Kondisi Barang (B,KB, RB)
	NAMA / JENIS BARANG	MERK / TYPE	Bahan			
1	2	3	4	5	6	7
101	Mesin Penggerak Diesel	YANMAR / TF-155 R	-	APBD	2013	KB
102	Mesin Penggerak Diesel	-	-	APBD	2013	KB
103	Molen Laboratorium	Kuda 125	Besi	APBD	2018	B
104	Mortar Cube Mold	Three Gang Mold	Besi	APBD	2017	B
105	Motrised Sand Equivalent Test Set	CONTROL/T56	Besi dan Plastik	APBD	2014	B
106	Mud Pump	Toho / BG-3C	Besi	APBD	2019	B
107	Multipurpose Digital Thermometer	CONTROLS / 82-D1229/A	Besi dan Plastik	APBD	2014	B
108	Naasra Meter	PAR / Parvid	Besi dan Plastik	APBD	2014	B
109	Oven	Memmert/UF450/Germany	Baja / Stainless Steel	APBD	2016	B
110	Paket Alat Laboratorium Tanah	-	-	APBD	2011	KB
111	Pallet Bantalan Alat Uji	Krisbow	Plastic	APBD	2018	B
112	Penetrasi Aspal	Controls/81 B0101/D Italy	Baja / Stainless Steel	APBD	2016	B
113	PH Meter Portable Ph56 Milwaukee	Milwaukee	-	APBD	2013	B

NO.	SPESIFIKASI BARANG			ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN BELI / PEROLEHAN	Kondisi Barang (B,KB, RB)
	NAMA / JENIS BARANG	MERK / TYPE	Bahan			
1	2	3	4	5	6	7
114	pH Waterproof Tester			APBD	2015	B
115	Pipa Baja Carbon Hitam L 150 cm dia. 2,5"	Type ASTM A.53	Besi	APBD	2018	B
116	Pipa Baja Carbon Hitam L 300 cm dia. 2,5"	Type ASTM A.53	Besi	APBD	2018	KB
117	Pipih Lonjong	ELE/EL42-0410, EL42-0600/Inggris	Baja / Stainless Steel	APBD	2016	B
118	Pompa Air Power Sprayer	Sanchin / SC-120	-	APBD	2013	KB
119	Pompa Air Suplay	Sanchin SC 120	Besi	APBD	2018	B
120	Portable Electronic Balance			APBD	2015	B
121	Portable pH Meters			APBD	2015	B
122	Proving Ring 10.000	BBS/BS 105.9		APBD	2020	B
123	Proving Ring 2.000	BBS/BG 001/2		APBD	2020	B
124	Proving Ring 6.000	BBS/BG 001/6		APBD	2020	B
125	Proving Ring Kapasitas 10000 Lbf	BBS / BG-001/7	-	APBD	2013	KB
126	Proving Ring Kapasitas 2000 Lbf	BBS / BG-001/5	-	APBD	2013	KB
127	Proving Ring Kapasitas 6000 Lbf	BBS / BG-001/6	-	APBD	2013	KB

NO.	SPESIFIKASI BARANG			ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN BELI / PEROLEHAN	Kondisi Barang (B,KB, RB)
	NAMA / JENIS BARANG	MERK / TYPE	Bahan			
1	2	3	4	5	6	7
128	Rak Besi Siku	IMW	Besi dan Kayu	APBD	2018	B
129	Sand Cone Test Set	CPN SE-350	Besi	-	2007	B
130	Sand Density Cone	Soil Test	Plastik dan Besi	APBD	2017	B
131	Sand Equivalent Test Set	CONTROL	Besi dan Plastik	APBD	2014	B
132	Saybolt Two Tube Digital Viscometer	CONTROLS / 81-B0121/A	Stainless Steel	APBD	2014	B
133	Saybolt Viscometer	CPN AS-250	Besi	-	2007	B
134	Schurter AC 220-230 V 220 A	Schurter Type TA45	Plastik	APBD	2017	B
135	Selang Delivery Host 40 meter	Powerstar Type WSD-101	Karet Benang Baja	APBD	2017	B
136	Sieve Agregat Diameter Besar		-	APBD	2013	B
137	Sieve Agregat Diameter Kecil		-	APBD	2013	B
138	Sieve Analisis Agregat Halus ukuran Kecil	Controls/15-D	Besi	APBD	2019	B
139	Sieve Analisis Agregat Halus ukuran Kecil	Controls/ASTM E11 US	Besi	APBD	2019	B
140	Sieve Analisis Agregat Kasar ukuran Kecil	BBS/BA 206	Besi	APBD	2019	B
141	Sieve Analisis Agregat Kasar ukuran Besar	Duraflex/DIN20022	Plastik	APBD	2019	B



NO.	SPESIFIKASI BARANG			ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN BELI / PEROLEHAN	Kondisi Barang (B,KB, RB)
	NAMA / JENIS BARANG	MERK / TYPE	Bahan			
1	2	3	4	5	6	7
		EN853 2SN12				
142	Single Core Barrel	ASTM A53 Type Drat Halus	Baja	APBD	2017	B
143	Slang Delivery Hose 1" (P. 15 M) + Coupling	Duraflex/DIN20022 EN853 2SN12	Plastik	APBD	2019	B
144	Slang Delivery Hose 3/4" (P. 15 M)+Coupling	Duraflex/DIN20022 EN853 2SN12	Plastik	APBD	2019	B
145	Slang Delivery host / Powerdraco	Powerdraco	Karet benang baja	APBD	2018	B
146	Slum Test Set (Cones)	BBS / BC-406	-	APBD	2013	B
147	Specific Gravity & Absorbtion Coarse Agregat	Lokal / Costum	Besi	APBD	2019	B
148	Spectrophotometer	PG Instruments / T80	-	APBD	2013	B
149	Spectrophotometer UV-Visible	-	-	APBD	2012	B
150	Stability Mold & Mold Marshall 6"	BBS/BB510.3	Besi	APBD	2019	B
151	StandADPL Crack Width Gauge For Walls	58-C0219/A1	Besi	-	2005	B
152	Standart Triaxial Sistem	Control / WF-4005		APBD	2015	B
153	Stang Bor AW Drill Rod 300 cm (Inside dia. 1,5 inch) ASTM A53	Indoma Asia Type ASTM A53	Baja	APBD	2017	B

NO.	SPESIFIKASI BARANG			ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN BELI / PEROLEHAN	Kondisi Barang (B,KB, RB)
	NAMA / JENIS BARANG	MERK / TYPE	Bahan			
1	2	3	4	5	6	7
154	Stang Bor AW Drill Rod 300 cm (outside dia. 2,5 inch) ASTM A53	Indoma Asia Type ASTM A53	Baja	APBD	2017	B
155	Tabung Coredrill dia. 2,5 inch	Shibuya	Baja	APBD	2017	RB
156	Tabung dan Mata Core Drill	Ehwa EH00079-69	Besi	APBD	2018	RB
157	Tabung dan Mata Core Drill	Ehwa EH00082-72	Besi	APBD	2018	RB
158	Tabung SPT	Type ASTM D 1586	Besi	APBD	2018	RB
159	Tangga Lipat	Krisbow/KW0100607	Besi	APBD	2019	B
160	Temperature and Humidity data logger	Krisbow/10028922	Plastik	APBD	2019	B
161	Thin Film Oven Test	CONTROLS / 81-B0160	-	APBD	2013	B
162	Timbangan	Ohaus/D51P 15HR1/USA	Stainless Steel dan plastik	APBD	2016	B
163	Timbangan	Ohaus/D51P 15HR1/USA	Stainless Steel dan plastik	APBD	2016	B
164	Timbangan , Kapasitas 6 Kg	-	-	APBD	2009	B
165	Timbangan Manual	Heavy Duty Type Triple Beem Balance With	Besi	APBD	2017	B

NO.	SPESIFIKASI BARANG			ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN BELI / PEROLEHAN	Kondisi Barang (B,KB, RB)
	NAMA / JENIS BARANG	MERK / TYPE	Bahan			
1	2	3	4	5	6	7
166	Total Station	NIKON / DTM-322(3")	-	APBD	2013	B
167	Tricone 27/8" Complete	Adaptor	-	-	2008	RB
168	Tripod	-	Besi	APBD	2018	B
169	Turbidity Portable Meter	Hanna / HI98703	Plastic	APBD	2018	B
170	Ultrasonic Bath with Timer	-	-	Hibah Bapedalda	2010	KB
171	Universal Oven	MEMMERT Gmbh / UN 750		APBD	2015	B
172	Universal Oven	Memmert / UN55	Besi	APBD	2018	B
173	Vacum Stand	CPN SE-345	Besi	-	2007	KB
174	Water Bath	Gewin/IK-YD (CS-G)	Besi dan Plastik	APBD	2019	B
175	Water Pas Digital	Kapro/985DL	Besi	APBD	2019	B
176	Water Still Destilation	Iwaki / WS-6		APBD	2020	B
177	Water Switel	NQ	-	-	2008	RB
178	Water-Field-Grab Sampler	-	-	Hibah Bapedalda	2010	B
179	Waterproof Portable EC/TDS/Resistivity/Salinity Meter	Hanna H198192	-	APBD	2017	B

Tabel 2. 10 Daftar Aset UPTD Workshop dan Peralatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA PERALATAN	MERK	TAHUN PEMBUATAN	NO . POLISI	KONDISI PERALATAN	POOL PERALATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Motor Grader	Komatsu / GD 31 RC Komatsu 4D-130-1	1982		RB	POOL TABING	
2	Motor Grader	Mitsubishi LG 2H	1983		RB	POOL TABING	
3	Motor Grader	Caterpillar 120 K	2011		B	POOL TABING	Register yang terpasang salah
4	Whell Loader	Kobelco / LK 300 Mitsubishi 6 RD 50 C	1983		RR	POOL TABING	
5	Whell Loader	Kobelco / LK 300 Mitsubishi 6 RD 50 C	1983		RB	POOL TABING	
6	Whell Loader	Kobelco / LK 300 Mitsubishi 6 RD 50 C	1983		RB	POOL TABING	
7	Whell Loader	Caterpillar 1X924HZ	2010		B	POOL TABING	
8	Mobile Crane	Tadano / TR 151 Nisan ND 604	1982		RB	POOL TABING	
9	Mobile Crane	Tadano / TR 151 Nisan ND 604	1982		RR	POOL TABING	

NO	NAMA PERALATAN	MERK	TAHUN PEMBUATAN	NO . POLISI	KONDISI PERALATAN	POOL PERALATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Flat Bed Truck	Mitsubishi 220 PS FN5277M2	2005		B	POOL TABING	
11	Asphalt Mixing Plant (AMP)	AMP-800-SA	2005		B	POOL TABING	
12	Generator Set Transportable	HARTECH	2006		B	POOL TABING	
13	Generator Set Stasioner	HARTECH HT-350 C/OPEN	2006		B	POOL TABING	
14	Backhoe Loader	CASE 580 Super R2 4 WD Paralel Loader Side Shift Backhoe	2007		RR	POOL TABING	
15	Backhoe Loader	CASE 580 Super R2 4 WD Paralel Loader Side Shift Backhoe	2007		RR	POOL TABING	
16	Backhoe Loader	CASE 580 SN	2015		B	BUKITTINGGI	
17	Backhoe Loader	CASE 580 SN	2015		B	Rehab/Pemel Wilayah Kab.Tanah Datar & Kota Padang Panjang	
18	Backhoe Loader	CASE 580 SN	2015		B	Rehab/Pemel Wilayah Kab. 50 Kota &	

NO	NAMA PERALATAN	MERK	TAHUN PEMBUATAN	NO . POLISI	KONDISI PERALATAN	POOL PERALATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kota Payakumbuh	
19	Backhoe Loader	CASE 580 SN	2015		B	Rehab/Pemel Wilayah Kab. Solok Selatan	
20	Backhoe Loader	CASE 570T			B	PAYAKUMBUH	
21	Backhoe Loader	CASE 570T			B	PAINAN	
22	Backhoe Loader	CASE 570T			B	Lubuk Sikaping	
23	Backhoe Loader	CASE 570T			B	PASAMAN BARAT	
24	Baby Roller	KUBOTA EA8-NB HV 80 ST	2010		B	POOL TABING	
25	Baby Roller	KUBOTA EA8-NB HV 80 ST	2012		B	Rehab/Pemel Wilayah Kab. Pasaman & Pasaman Barat	
26	Baby Roller	KUBOTA EA8-NB HV 80 ST	2012		B	Rehab/Pemel Wilayah Kab. Agam & Kota Bukittinggi	
27	Baby Roller	KUBOTA EA8-NB HV 80 ST	2012		B	Rehab/Pemel Wilayah Kab. 50Kota & Kota Payakumbuh	
28	Baby Roller	KUBOTA EA8-NB HV 80 ST	2012		B	Rehab/Pemel Wilayah Kab. Pdg	

NO	NAMA PERALATAN	MERK	TAHUN PEMBUATAN	NO . POLISI	KONDISI PERALATAN	POOL PERALATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pariaman, Kota Pariaman & Kota Padang	
29	Baby Roller	KUBOTA EA8-NB HV 80 ST	2012		B	Rehab/Pemel Wilayah Kab. Solok & Kota Solok	
30	Baby Roller	KUBOTA EA8-NB HV 80 ST	2012		B	POOL TABING	
31	Baby Roller	KUBOTA EA8-NB HV 80 ST	2012		B	Rehab/Pemel Wilayah Kab.Sawahlunto, Kab.Sijunjung & Kab.Dharmasraya	
32	Baby Roller	KUBOTA EA8-NB HV 80 ST	2012		B	Rehab/Pemel Wilayah Kab. Pesisir Selatan	
33	Baby Roller	KUBOTA EA8-NB HV 80 ST	2014		B	POOL TABING	
34	Baby Roller	KUBOTA EA8-NB HV 80 ST	2014		B	POOL TABING	
35	Tandem Roller				B	Lubuk Sikaping	
36	Tandem Roller				B	PAYAKUMBUH	
37	Tandem Roller				B	SOLOK	

NO	NAMA PERALATAN	MERK	TAHUN PEMBUATAN	NO . POLISI	KONDISI PERALATAN	POOL PERALATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Tandem Roller				B	SIJUNJUNG	
39	Tandem Roller				B	POOL TABING	
40	Grass Cutter on Wheel	ROVER 13 HP 28169	2005		B	POOL TABING	
41	Forklift	Caterpillar PD30NT	2011		B	POOL TABING	
42	Excavator	Caterpillar 320D	2011		B	POOL TABING	LANGGAI
43	Excavator	Komatsu / PC200			B		MALALAK
44	Mini Excavator				B	SIJUNJUNG	
45	Bulldozer	Caterpillar D6R	2012		RR	POOL TABING	Diperbaiki tahun 2021
46	Dump Truck	Isuzu ELF HD 125 PS	2012	BA 8203 B	B	SOLOK	
47	Dump Truck	Isuzu ELF HD 125 PS	2012	BA 8204 B	B	PAYAKUMBUH	
48	Dump Truck	Isuzu ELF HD 125 PS	2012	BA	B	BATUSANGKAR	



NO	NAMA PERALATAN	MERK	TAHUN PEMBUATAN	NO . POLISI	KONDISI PERALATAN	POOL PERALATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				8205 B			
49	Dump Truck	Isuzu ELF HD 125 PS	2013	BA 8073 B	B	AGAM	
50	Dump Truck	Isuzu ELF HD 125 PS	2013	BA 8031 B	B	SOLOK SELATAN	
51	Dump Truck	Isuzu ELF HD 125 PS	2013	BA 8071 B	B	PASAMAN	
52	Dump Truck	Isuzu ELF HD 125 PS	2013	BA 8203 B	B	BUKITTINGGI	
53	Dump Truck	Isuzu ELF HD 125 PS	2013	BA 8204 B	B	SIJUNJUNG	
54	Dump Truck	Isuzu ELF HD 125 PS	2014	BA 8290 B	B	PARIAMAN	
55	Dump Truck	Isuzu ELF HD 125 PS	2014	BA 8289 B	B	PAINAN	
56	Compressor + Breaker	Atlas Copco XAS 97	2012		B	Rehab/Pemel Wilayah Kab. Pasaman & Pasaman Barat	
57	Compressor + Breaker	Atlas Copco XAS 97	2012		B	Rehab/Pemel Wilayah Kab. Pesisir	

NO	NAMA PERALATAN	MERK	TAHUN PEMBUATAN	NO . POLISI	KONDISI PERALATAN	POOL PERALATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Selatan	
58	Compressor + Breaker	Atlas Copco XAS 97	2012		B	Rehab/Pemel Wilayah Kab. 50Kota & Kota Payakumbuh	
59	Compressor + Breaker	Atlas Copco XAS 97	2012		B	Rehab/Pemel Wilayah Kab.Tanah Datar & Kota Padang Panjang	
60	Compressor + Breaker	Atlas Copco XAS 97	2012		B	Rehab/Pemel Wilayah Kab. Pdg Pariaman, Kota Pariaman & Kota Padang	
61	Compressor + Breaker	Atlas Copco XAS 97	2012		B	Rehab/Pemel Wilayah Kab. Solok Selatan	
62	Compressor + Breaker	Atlas Copco XAS 97	2012		RR	POOL TABING	
63	Compressor + Breaker	Atlas Copco XAS 97	2012		B	Rehab/Pemel Wilayah Kab. Agam & Kota Bukittinggi	
64	Compressor + Breaker	Atlas Copco XAS 97	2014		B	POOL TABING	
65	Compressor + Breaker	Atlas Copco XAS 97	2014		B	POOL TABING	
66	Compressor + Breaker	Atlas Copco XAS 97	2014		RR	POOL TABING	

NO	NAMA PERALATAN	MERK	TAHUN PEMBUATAN	NO . POLISI	KONDISI PERALATAN	POOL PERALATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Truck Crane	Isuzu - Unic ELF 125 PS / UR - V294	2013	BA 8091 B	B		
68	Truck Crane	Isuzu - Unic ELF 125 PS / UR - V294	2013	BA 8101 B	B		
69	Truck Crane	Isuzu - Unic ELF 125 PS / UR - V294	2013	BA 8098 B	B		
70	Truck Crane	Isuzu - Unic ELF 125 PS / UR - V294	2013	BA 8099 B	B		
71	Truck Crane	Isuzu - Unic ELF 125 PS / UR - V294	2013	BA 8089 B	B		
72	Truck Crane	Isuzu - Unic ELF 125 PS / UR - V294	2014	BA 8283 B	B		
73	Truck Crane	Isuzu - Unic ELF 125 PS / UR - V294	2014	BA 8282 B	B	BUKITTINGGI	
74	Truck Crane	Isuzu - Unic ELF 125 PS / UR - V294	2014	BA 8281 B	B		
75	Truck Crane	Isuzu - Unic ELF 125 PS / UR - V294	2014	BA 8280 B	B		

NO	NAMA PERALATAN	MERK	TAHUN PEMBUATAN	NO . POLISI	KONDISI PERALATAN	POOL PERALATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
76	Truck Crane	Isuzu - Unic ELF 125 PS / UR - V294	2014	BA 8277 B	B	POOL TABING	
77	Chain Saw	Stihl MS 381	2015		B	POOL TABING	
78	Mobil Operasional Lapangan	Isuzu Pick Up GD dengan 3 (tiga) bukaan Bak	2015	BA 8354 B	B		
79	Mobil Operasional Lapangan	Isuzu Pick Up GD dengan 3 (tiga) bukaan Bak	2015	BA 8352 B	B		
80	Mobil Operasional Lapangan	Isuzu Pick Up GD dengan 3 (tiga) bukaan Bak	2015	BA 8353 B	B		
81	Mobil Operasional Lapangan	Isuzu Pick Up GD dengan 3 (tiga) bukaan Bak	2015	BA 8355 B	B		
82	Jembatan Bailey				B	BPBD SIJUNJUNG	LUBUK TAROK
83	Jembatan Bailey				B	APBD BASO	PANGKALAN
84	Jembatan Bailey				B	PPTK AGAM	PALEMBAYAN
85	Jembatan Bailey				B	PPTK TANAH DATAR	HALABAN

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Adapun kinerja Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang Tahun 2016-2021 mengacu pada pencapaian atas indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut capaian atas indikator tersebut.

### A. Meningkatnya Keterpaduan Penataan Ruang Wilayah

Persentase kesesuaian rencana pembangunan dan rencana tata ruang adalah tercapainya target peningkatan keterpaduan penataan ruang wilayah dari kondisi tahun 2016 sebesar 80.00% menjadi 84.00% pada tahun 2020.

### B. Meningkatnya Kemantapan Jalan

- 1 Persentase jalan propinsi dalam kondisi mantap adalah tercapainya target peningkatan kemantapan jalan propinsi dari kondisi tahun 2016 sebesar 70.14 % menjadi 73.92 % pada tahun 2020.
- 2 Prosentase jalan nasional dalam kondisi mantap adalah tercapainya target peningkatan kemantapan jalan nasional sebesar dari kondisi tahun 2016 sebesar 88% menjadi 90,92 % pada tahun 2020.

Gambaran pencapaian Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2. 11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2016 - 2020 Provinsi Sumatera Barat**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tujuan dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	B	B	BB	BB	BB	B	B	BB	BB	BB	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Jalan Mantap	-	-	-	70.00%	71.00%	72.00%	73.00%	74.00%	70.14%	71.05%	72.06%	73.02%	73.92%	100%	100%	100%	100%	100%
3	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan	-	-	-	5 Unit	8 Unit	8 Unit	3 Unit	5 Unit	NA	7 unit	5 unit	-	-	NA	88%	63%	-	-
4	Persentase Cakupan Air Minum	-	-	-	70.00%	72.00%	75.00%	80.00%	80.00%	72.32%	75.83%	76.04%	78.65%	80.04%	103%	105%	101%	98%	100%
5	Persentase Cakupan Sanitasi	-	-	-	72.00%	73.00%	75.00%	78.00%	79.00%	72.00%	75.88%	75.19%	79.78%	81.68%	100%	104%	100%	102%	103%
6	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	-	-	-	80.00%	81.00%	82.00%	83.00%	84.00%	80.00%	84.00%	84.00%	84.00%	84.00%	100%	104%	102%	101%	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa hampir sebagian besar indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah memiliki rasio pencapaian atas target sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa setiap target indikator dapat tercapai. Adapun pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah merata, sesuai dengan masing-masing indikator yang ingin dicapai. Tidak ada gap rasio pencapaian pada masing-masing pelayanan.

**Tabel 2. 12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2020**

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran pada Tahun ke - (dalam Juta Rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (dalam Juta Rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,693.70	3,825.00	5,264.00	5,522.00	6,681.00	4,105.00	3,527.00	4,667.00	5,444.00	4,846.00	0.87	0.92	0.89	0.99	0.73	0.42	0.18
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,937.40	1,403.00	4,110.00	3,234.00	3,912.00	1,671.00	1,217.00	6,717.00	6,508.00	3,175.00	0.86	0.87	1.63	2.01	0.81	1.02	0.90
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	309.90	202.00	348.00	330.00	399.00	294.00	297.00	300.00	271.00	-	0.95	1.47	0.86	0.82	-	0.29	-1.00
4	Program Kapasitas Sumberdaya Aparatur	340.20	238.00	382.00	412.00	499.00	280.00	223.00	162.00	255.00	92.00	0.82	0.94	0.42	0.62	0.18	0.47	-0.67
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	1,546.30	705.00	1,607.00	1,828.00	2,212.00	1,592.00	774.00	1,259.00	1,503.00	1,510.00	1.03	1.10	0.78	0.82	0.68	0.43	-0.05
6	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset	-	630.00	-	-	-	-	714.00	-	-	-	-	1.13	-	-	-	-	-
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	300.00	300.00	337.00	664.00	804.00	279.00	242.00	285.00	411.00	344.00	0.93	0.81	0.85	0.62	0.43	1.68	0.23
8	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	273,443.00	156,072.00	298,000.00	345,211.00	417,654.00	246,901.00	132,545.00	204,489.00	154,052.00	42,674.00	0.90	0.85	0.69	0.45	0.10	0.53	-0.83
9	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi	45,535.00	39,250.00	80,036.00	64,254.00	77,738.00	43,786.00	32,198.00	62,761.00	47,955.00	126,046.00	0.96	0.82	0.78	0.75	1.62	0.71	1.88

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran pada Tahun ke - (dalam Juta Rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (dalam Juta Rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke Binamargaan	2,909.00	950.00	2,914.00	3,311.00	4,006.00	2,216.00	1,273.00	1,968.00	3,705.00	1,093.00	0.76	1.34	0.68	1.12	0.27	0.38	-0.51
11	Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	1,480.00	850.00	1,550.00	2,023.00	2,448.00	1,253.00	747.00	1,232.00	606.00	526.00	0.85	0.88	0.79	0.30	0.21	0.65	-0.58
12	Program Pengembangan kinerja penyelenggaraan pusat informasi pengembangan permukiman dan bangunan	-	400.00	-	-	-	-	281.00	-	-	-	-	0.70	-	-	-	-	-
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kab/Kota	35,562.00	-	11,850.00	11,700.00	14,155.00	-	-	2,771.00	1,479.00	258.00	-	-	0.23	0.13	0.02	-0.60	-
14	Program Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/ Kota	145,022.00	139,690.00	201,879.00	227,550.00	275,302.00	138,765.00	119,884.00	143,245.00	163,127.00	160,829.00	0.96	0.86	0.71	0.72	0.58	0.90	0.16
15	Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	5,772.00	-	-	-	-	2,484.00	-	-	-	-	0.43	-	-	-	-	-1.00	-1.00
16	Program Pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi	-	-	-	6,100.00	7,380.00	-	211.00	630.00	4,745.00	607.00	-	-	-	0.78	0.08	-	-
17	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	-	-	1,150.00	800.00	968.00	-	-	711.00	802.00	1,230.00	-	-	0.62	1.00	1.27	-	-
18	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum dan Air Limbah	-	4,550.00	-	-	-	27,000.00	4,230.00	-	-	-	-	0.93	-	-	-	-	-1.00
19	Program Pengembangan Perumahan	636.00	-	-	-	-	555.00	-	-	-	-	0.87	-	-	-	-	-1.00	-1.00



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran pada Tahun ke - (dalam Juta Rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (dalam Juta Rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
20	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1,275.00	-	-	-	-	1,210.00	-	-	-	-	0.95	-	-	-	-	-1.00	-1.00
21	Program Perencanaan Penataan Ruang	9,100.00	2,550.00	7,850.00	10,150.00	12,280.00	5,875.00	2,442.00	4,140.00	4,091.00	1,169.00	0.65	0.96	0.53	0.40	0.10	0.35	-0.80
22	Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	200.00	100.00	900.00	900.00	1,089.00	192.00	113.00	326.00	147.00	175.00	0.96	1.13	0.36	0.16	0.16	4.45	-0.09

Tabel diatas menunjukkan fluktuasi anggaran sepanjang kurun waktu 2016-2020 pada masing-masing program. Hal ini disebabkan adanya program yang baru muncul ataupun dihilangkan sesuai dengan tingkat prioritas program dan kondisi eksisting.

## 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L tahun 2020-2024 dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima (5) tahun mendatang. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan yang dihadapi harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.

**Tabel 2. 13 Kekuatan dan Kelemahan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang**

<b>Internal</b>	
<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Peraturan perundangan yang mengatur regulasi kegiatan bidang BMCKTR. Adanya SDM pegawai BMCKTR yang terlatih dan berpengalaman.</li> <li>2. Adanya SK Gubernur No: 600-903.1-2015 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya sebagai Jalan Provinsi</li> <li>3. Telah tersusunnya RTRW Provinsi Sumbar.</li> <li>4. Dinas BMCKTR memiliki laboratorium konstruksi dan lingkungan sendiri.</li> <li>5. Sumatera Barat memiliki potensi sumber air yang baik untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat .</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya nilai kemantapan jalan Provinsi</li> <li>2. Masih banyaknya jalan yang belum terkoneksi ke kawasan strategis.</li> <li>3. Masih adanya ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis seperti lebar, alinyemen, struktur lapisan.</li> <li>4. Keterbatasan lahan &amp; adanya kendala pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur.</li> <li>5. Masih ada bangunan pemerintahan, strategis, evakuasi yang belum selesai.</li> <li>6. Masih adanya kawasan strategis yang belum tertata bangunan dan lingkungannya.</li> <li>7. Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang.</li> </ol>

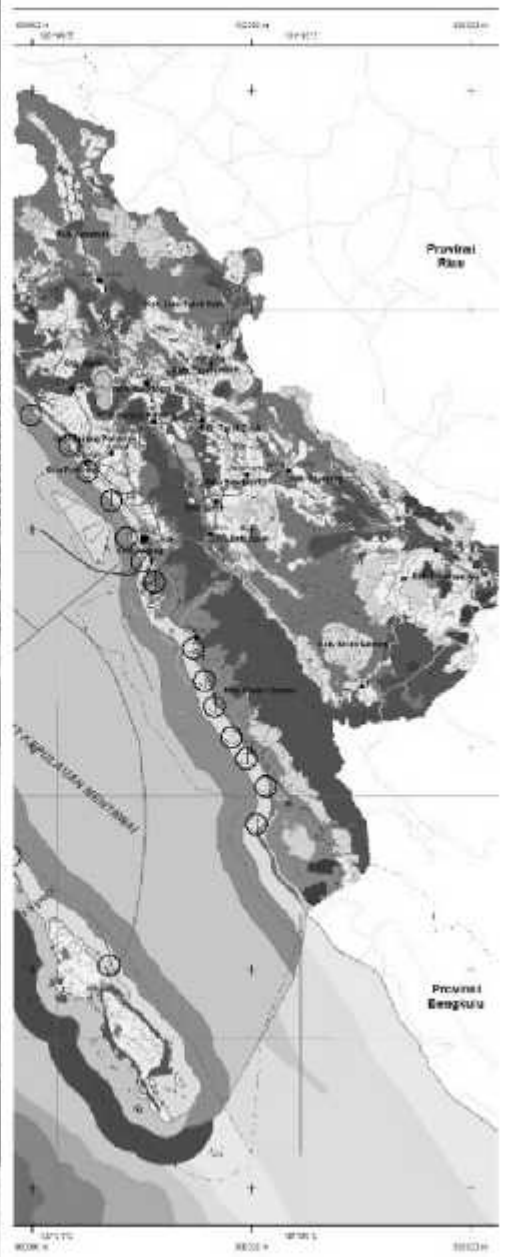
Tabel 2. 14 Tantangan dan Peluang Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Peluang		Tantangan	
1.	Tersedianya peraturan peraturan terkait infrastruktur.	1.	Sebagian besar wilayah Sumatera Barat rawan terhadap bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, kekeringan dan bencana lainnya
2.	Tersedianya teknologi pendukung yang membantu pekerjaan.	2.	Belum meratanya aksesibilitas jaringan jalan di provinsi Sumatera Barat dan jalan menuju provinsi tetangga.
3.	Tersedianya kesempatan tugas belajar, diklat dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM	3.	Keterbatasan lahan serta rumitnya permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan di daerah Sumatera Barat
		4.	Belum memadainya ketersediaan bangunan strategis dan bangunan evakuasi sementara
		5.	Masih banyaknya daerah kab/kota yang belum menyusun RDTR
		6.	Masih adanya penyedia jasa konstruksi yang berkualitas rendah
		7.	Belum terintegrasinya RTRW Provinsi dengan zona RZP3K

# BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026



## BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tentu ada tantangan dan peluang untuk lima tahun kedepan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang. Setelah dilakukan identifikasi resiko terhadap beberapa akar masalah dalam pencapaian kinerja pelayanan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka dapat digambarkan permasalahan yang dihadapi.

Permasalahan dalam Pengelolaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kemantapan jalan masih dibawah kemantapan jalan Nasional	Banyaknya jalan provinsi dalam kondisi rusak	Banyaknya jalan provinsi dalam kondisi rusak akibat muatan lebih, kejadian bencana alam, dan kurangnya kepedulian masyarakat dalam pemanfaatan jalan
			Belum terpenuhinya persyaratan minimum untuk lebar dan kualitas struktur jalan berkaitan dengan volume serta beban muatan ganda yang melewati standar
			Banyaknya lokasi rawan longsor, amblas, banjir.
2.	Belum meratanya konektivitas jalan Provinsi	Lambatnya proses pelaksanaan pembangunan jalan untuk konektivitas	Belum meratanya konektivitas jalan antar daerah kabupaten/kota, /provinsi tetangga, jalan mitigasi bencana, jalan menuju kawasan strategis, dan dan akses jalan pesisir pantai barat Pulau Sumatera.
			Belum sinerginya penanganan antara jalan nasional, jalan provinsi dan jalan Kabupaten/Kota karena adanya pemisahan tugas dalam Undang Undang Jalan yang menyebabkan terkotak-kotaknya program penanganan jalan
			Sulitnya proses pembebasan lahan untuk pembangunan/ pelebaran jalan.
			Panjangnya proses perizinan akibat regulasi yang harus dilaksanakan untuk pembangunan jalan.
			Besarnya biaya penanganan jalan akibat topografi yang berada di daerah perbukitan/pegunungan.
3.	Masih rendahnya capaian akses air minum	Pembangunan infrastruktur belum menunjang peningkatan capaian akses secara signifikan	Belum sinerginya pembangunan SPAM Regional baik kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota.
		Lamanya proses kesepakatan/ MOU lintas Kab/Kota	Keterbatasan sumber air baku di beberapa Kab/ Kota
4.	Masih rendahnya capaian akses air limbah	Rendahnya pelayanan air limbah regional	Pemerintah Provinsi belum bisa menunjang pembangunan untuk infrastruktur air limbah regional
			Topografi wilayah perbatasan yang belum menunjang untuk pembangunan infrastruktur air limbah regional
			Sulitnya pembebasan lahan
5.	Capaian pelayanan sampah masih rendah	Sulitnya mencari lokasi TPA Regional	Keterbatasan lahan untuk pembangunan TPA Regional di beberapa Kab/Kota
			Keterbatasan lahan untuk pembangunan IPLT di beberapa Kab/Kota
6.	Belum tercapainya target pembangunan gedung infrastruktur di kawasan strategis	Target sumber dana selain APBD tidak tercapai	Masih belum tuntasnya pembangunan beberapa bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi dan bangunan evakuasi sementara (shelter) pada daerah Kab/Kota yang berada di pesisir pantai barat Sumatera.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
7.	Belum terangkannya di perencanaan pembangunan	Masih belum menjadi prioritas pembangunan daerah	Kurang Fokusnya pembangunan terhadap penataan bangunan dan lingkungannya pada Kawasan strategis
			Masih ada kawasan yang belum jelas status kepemilikan lahannya
8.	Masih terdapat pelaksanaan pembangunan yang belum mengacu RTRW	Terdapat program strategis Kepala Daerah yang belum sesuai dengan indikasi program RTRW	Kebijakan pembangunan nasional dan strategis kepala daerah bersifat dinamis, sehingga rentan mengalami perubahan.
9.	Jumlah perda RDTR terbatas	Kab/Kota masih fokus dalam penyusunan RTRW	Adanya perbedaan tahun perencanaan dalam RTRW(20 tahun) dan rencana pembangunan (5 tahun pada RPJMD dan Renstra dan 1 Tahun pada RKPD dan Renja), sehingga adanya kemungkinan program pembangunan yang belum termuat dalam RTRW.
			Adanya perbedaan <i>timeline</i> perencanaan antar sektor, sehingga ada program sektoral yang belum terakomodir pada saat penyusunan Rencana Tata Ruang.
			Adanya perubahan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang juga mengalami perubahan.
			Proses legalisasi Rencana Tata Ruang yang panjang dan melibatkan banyak sektor, sehingga proses legalisasinya menjadi lama.
			Urusan penataan ruang belum menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumatera Barat.

### 3.2.1 Visi

Visi Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 merupakan visi kepala daerah terpilih yang merupakan kondisi objekif yang akan diwujudkan pada 5 (lima) tahun mendatang.

**VISI Gubernur Sumatera Barat yaitu :**

## TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN

Sedangkan Misi Gubernur Sumatera Barat yaitu :

1. *Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.*
2. *Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah.*
3. *Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.*
4. *Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi digital.*
5. *Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.*
6. *Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.*
7. *Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.*



**Tabel 3. 2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Terhadap Pencapaian Visi Misi Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2021 - 2026**

No	Visi Misi	Permasalahan Pembangunan	Faktor yang Mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih banyak jalan yang belum terkoneksi</li> <li>Masih banyaknya lebar jalan yang belum memenuhi standar jalan provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapatnya kendaraan dengan muatan yang melebihi dari yang diizinkan</li> <li>Kondisi jalan masih banyak yang rusak</li> <li>Masih seringnya terjadi bencana alam</li> <li>Sulitnya proses pembebasan lahan untuk pembangunan/ pelebaran jalan</li> </ul>	Komitmen dari pemerintah daerah
2		Masih rendahnya peningkatan capaian akses air minum dan sanitasi layak dan aman	Keterbatasan sumber air baku di beberapa kab/ kota Masih banyaknya terkendala dengan pembebasan lahan Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap akses air minum layak dan sanitasi aman	Komitmen dari pemerintah daerah
3		Belum tercapainya target pembangunan gedung infrastruktur di kawasan strategis	Rendahnya akses sarana dan prasarana menuju kawasan strategis Masih ada kawasan yang belum jelas status kepemilikan lahannya	Komitmen dari pemerintah daerah
4		Masih terdapat pelaksanaan pembangunan yang belum	Terdapat program strategis Kepala Daerah yang belum sesuai dengan indikasi program RTRW	Secara normatif penyusunan RPJMD harus mengacu pada RTRW
		Jumlah perda RDTR terbatas	Kab/ Kota masih fokus dalam penyusunan perda RTRW	RDTR berperan sebagai acuan dalam mengeluarkan KKPR untuk perizinan

Misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Misi ke 6 **Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**. Seiring dengan harapan tersebut Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk mampu mewujudkan visi pembangunan Sumbar tahun 2021 - 2026 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur No. 3 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

### 3.2.2 Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Terpilih

Adapun peran Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang terhadap pencapaian Visi, Misi Gubernur sangat erat. Sesuai dengan Misi Gubernur, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang ikut berperan terhadap pencapaian Misi ke - 6 yaitu **Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**, meskipun secara tidak langsung juga berperan terhadap pencapaian misi lainnya seperti pada Misi ke 4 yaitu Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan yang Tangguh, Produktif, Berdaya Saing Regional dan Global, dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Daerah. Pada Misi ini, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang melalui program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi turut berperan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana destinasi pariwisata serta dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.

Dalam mencapai misi Gubernur tersebut ada beberapa faktor yang dapat menghambat ataupun mendorong tercapainya misi tersebut. Pelimpahan jalan kabupaten/kota ke provinsi melalui SK Jalan Provinsi Tahun 2015 mengakibatkan menurunnya persentase kemantapan jalan provinsi. Sementara itu, Jalan merupakan faktor penting dalam mendukung aksesibilitas dan pembangunan. Jalan yang mantap merupakan pengungkit atau katalisator bagi pembangunan.

## 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024 disebutkan bahwa visi Kementrian PUPR adalah :

**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

**Tabel 3. 3 Permasalahan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Renstra Kementerian PUPR beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra Kemen PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas BMCKTR	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
SS-2 : Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional,				
1	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jaringan jalan yang belum memenuhi waktu tempuh</li> <li>● Masih banyak jalan yang belum terkoneksi</li> <li>● Masih banyaknya lebar jalan yang belum memenuhi standar jalan provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Banyaknya aktivitas di kiri kanan jalan (hambatan samping)</li> <li>● Terdapatnya kendaraan dengan muatan yang melebihi dari yang diizinkan</li> <li>● Kondisi jalan masih banyak yang rusak</li> <li>● Masih seringnya terjadi bencana alam</li> <li>● Sulitnya proses pembebasan lahan untuk pembangunan/ pelebaran jalan</li> </ul>	Komitmen dari pemerintah daerah
SS-3 : Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau (sesuai dengan kewenangan Provinsi)				
1	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i> ;	Masih rendahnya peningkatan capaian akses air minum dan sanitasi layak dan aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Keterbatasan sumber air baku di beberapa kab/ kota</li> <li>● Masih banyaknya terkendala dengan pembebasan lahan</li> <li>● Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap akses air minum layak dan sanitasi</li> </ul>	Komitmen dari pemerintah daerah

No	Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra Kemen PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas BMCKTR	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			aman	
SS-5 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya				
1	Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis	Belum tercapainya target pembangunan gedung infrastruktur di kawasan strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rendahnya akses sarana dan prasarana menuju kawasan strategis</li> <li>● Masih ada kawasan yang belum jelas status kepemilikan lahannya</li> </ul>	Komitmen dari pemerintah daerah

### 3.4 Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Dalam Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementrian ATR) Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa tujuan utama Kementerian ATR adalah memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan unntuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan tujuan itu, rumusan sasaran strategis Kementerian ATR yang terkait dengan tupoksi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang antara lain :

- a. Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
- b. Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara)

Penyelenggaraan pentaaan ruang tahun 2015-2019 diarahkan untuk mewujudkan Nawa Cita terkait dengan pembangunan Indonesia dari pinggiran, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing ekonomi, dan pengembangan tol laut, kedaulatan pangan dan energi, pengembangan kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau terluar, disparitas pembangunan antar wilayah dan kawasan, dan perubahan iklim.

Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria bidang Penataan Ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, rencana Detail Tata Ruang, fasilitasi dpenyediaan peta skala 1:5000, pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS.

**Tabel 3. 4 Permasalahan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Renstra Kementerian ATR-BPN**

No	Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra Kemen ATR-BPN	Permasalahan Pelayanan Dinas BMCKTR	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	SS - 2 : Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan			
1	Persentase Peningkatan kesesuaian Rencana program Pembangunan sektor dengan rencana tata ruang	Masih terdapat pelaksanaan pembangunan yang belum mengacu RTRW	Terdapat program strategis Kepala Daerah yang belum sesuai dengan indikasi program RTRW	Secara normatif penyusunan RPJMD harus mengacu pada RTRW
2	Peningkatan tertib tata ruang	Jumlah perda RDTR terbatas	Kab/ Kota masih fokus dalam penyusunan perda RTRW	RDTR berperan sebagai acuan dalam mengeluarkan KKPR untuk perizinan

### 3.5 Telaahan RTRW Provinsi Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

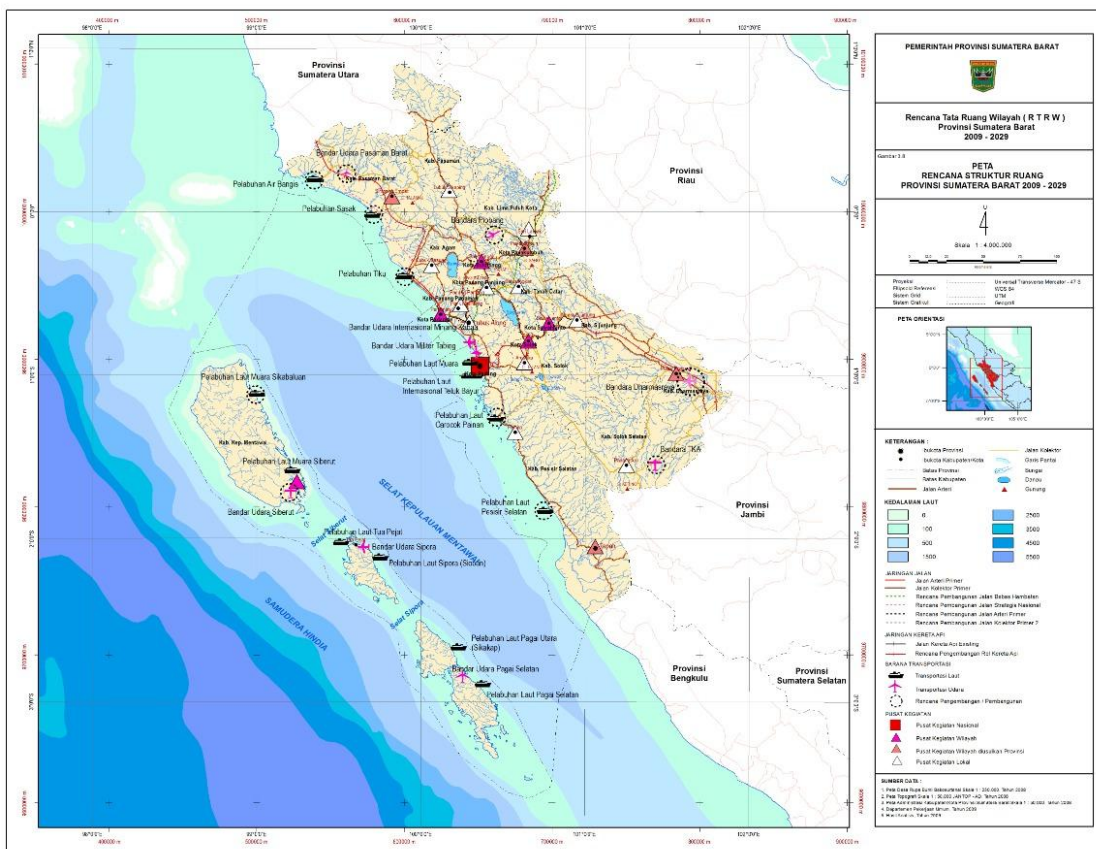
Dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat disebutkan bahwa pengembangan prasarana wilayah dengan dukungan infrastuktur dilakukan dengan tetap memperhatikan ekosistem alam dan daya dukung wilayah secara berkelanjutan, dengan pola ruang sebagai berikut :

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan Provinsi Sumatera Barat;
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah;
3. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah;
4. Peningkatan fungsi Kota Padang menjadi kota metropolitan;
5. Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah;
6. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan;
7. Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah.

Hubungan antara Kabupaten Kota dibentuk dengan sistem jaringan jalan antara Provinsi (Jalan Nasional) dan antara Kabupaten/Kota (Jalan Provinsi) serta di

lingkungan Kabupaten/Kota itu sendiri (Jalan Kabupaten/Kota) Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi telah terhubung dengan 18 Ibu Kota Kabupaten/Kota.

Gambar 3. 1 Struktur Ruang berdasarkan Perda RTRW Nomor 13 Tahun 2012



Pembentukan Struktur Ruang didasari atas pola jaringan jalan yang telah ada, maka untuk pengembangan prasarana wilayah perlu dibangun/ditingkatkan dan beberapa ruas jalan dengan mengacu pada SK Gubernur Sumbar No: 600-903.1-2015 tentang Jalan Provinsi.

Tabel 3. 5 Ruas Jalan Provinsi Berdasarkan SK Gubernur Sumbar. No: 600-903.1-2015 Tgl 18 Desember 2015

NO	KODE RUAS		NAMA RUAS JALAN	PANJANG (KM)	KETERANGAN		
	NO. RUAS	SFX			ASPAL	BETON/TANAH	BELUM TEMBUS
1	007		Simancung - Tj. Ampalu	11,08	11,08		
2	008		Tj. Ampalu - Sijunjung	20,00	20,00		
3	010		Simp. Sikabau - Simp. Koto Baru	29,00	29,00		
4	011		Simp. Koto Baru - Tj. Simalidu	11,90	11,90		
5	012		Simp. Koto Baru - Junction	5,40	5,40		
6	018		Indera Pura - Muara Sakai	7,30	7,30		

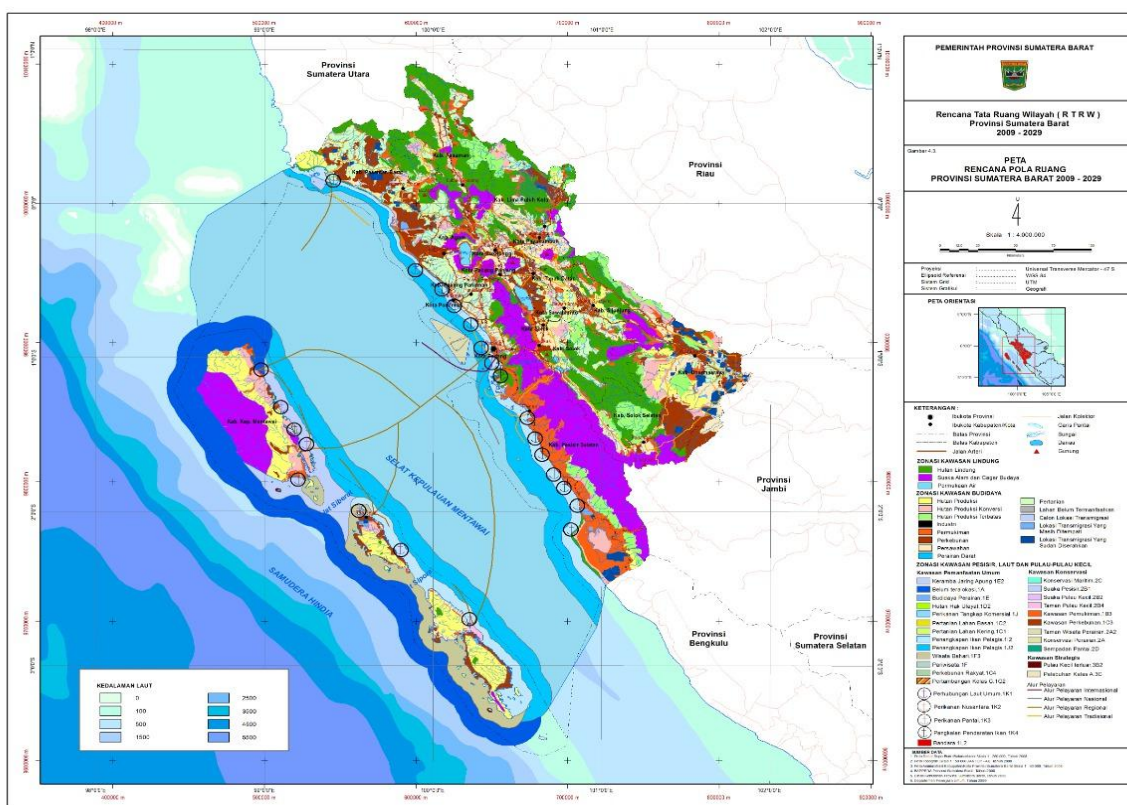
NO	KODE RUAS		NAMA RUAS JALAN	PANJANG (KM)	KETERANGAN		
	NO. RUAS	SFX			ASPAL	BETON/TANAH	BELUM TEMBUS
7	025		Manggopoh - Padang Luar	69,43	69,43		
8	028		Sicincin - Kurai Taji	16,44	16,44		
9	031		Panti - Simpang Empat	74,23	74,23		
10	033		Simpang Empat - Sasak	20,00	20,00		
11	034	2	Air Balam - Air Bangis	12,60	12,60		
12	035		Kubu Kerambil - Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang)	18,50	18,50		
13	036		Baso - Bts. Batusangkar (Balai Selasa)	28,79	28,79		
14	037		Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino	10,40	10,40		
15	038		Guguk Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga)	30,60	30,60		
16	039		Guguk Cino - Sitangkai	15,12	15,12		
17	040		Sitangkai - Tj. Ampalu	17,28	17,28		
18	044		Bts. Kota Payakumbuh - Sitangkai	50,61	50,61		
19	054		Junction - Abai siat	12,60	12,60		
20	055		Sijunjung - Tanah Badantung	4,40	4,40		
21	056	1	Simp. Padang Aro - Lubuk Malako	20,00	20,00		
22	056	2	Lubuk Malako - Abai Sangir	17,00	17,00		
23	056	3	Abai Sangir - Sei. Dareh	74,00	14,53	59,48	
24	068		Padang Sawah - Kumpulan	36,50	36,50		
25	069	2	Bts. Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	46,85	46,85		
26	070		Batusangkar - Ombilin	18,51	18,51		
27	071		Solok - Alahan Panjang	47,80	47,80		
28	072		Lubuk Basung - Sungai Limau	30,90	30,90		
29	073		Pasar Baru - Alahan Panjang	49,40	23,84	25,56	
30	075		Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman	20,50	20,50		
31	076		Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur	73,95	58,95	15,00	
32	078		Simpang Koto Mambang - Balingka	39,40	39,40		
33	079		Simpang Baso - Piladang	11,14	11,14		
34	080		Matur - Palembang	20,70	20,70		
35	081		Palembayan - Palupuh (Simp. Patai)	13,30	13,30		
36	082		Alahan Panjang - Kiliran Jao	72,90	17,05	25,83	30,03
37	083		Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan	44,10	1,31	30,19	12,60

NO	KODE RUAS		NAMA RUAS JALAN	PANJANG (KM)	KETERANGAN		
	NO. RUAS	SFX			ASPAL	BETON/TANAH	BELUM TEMBUS
38	084		Jl. Lingkar Selatan (Payakumbuh)	14,17	14,17		
39	085		Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo ( TPA Regional )	2,05	2,05		
40	086		Surantih - Kayu Aro - Langgai	27,70	4,50	13,20	10,00
41	087		Duku - Sicincin	28,65	0,00	18,65	10,00
42	088		Padang Koto Gadang - Palembang	31,00	31,00		
43	089		Jl. Balingka - Terowongan - Ngarai Sianok	9,70	9,70		
44	090		Palupuh - Pua gadih - Koto Tinggi	25,00	13,00	12,00	
45	091		Simpang Napar - Bukit Bual - Tanjung Ampalu	23,00	5,00	18,00	
46	092		Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Sumani	28,40	28,40		
47	093		Singkarak - Aripin - Tj. Balit - Padang Ganting	30,00	27,00	3,00	
48	094		Pintu Angin - Labuah Saiyo	5,50	3,00	2,50	
49	095		Rao - Rokan (Batas Riau)	33,00	33,00		
50	096		Lubuk Sikaping - Talu	28,00	7,00	21,00	
51	097		Bungo Tanjung - Teluk Tapang	43,20	2,50	40,70	
52	098		Teluk Bayur - Nipah - Purus	12,00	3,00	8,80	0,20
53	099		Purus - Bandara International Minangkabau	16,00			16,00
54	100		Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan	1,20	1,20		
55	101		Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur	47,00	3,00	38,00	6,00
56	102		Rawang - Talawi	6,00	6,00		
57	103		Simp. SP II - Kantor Camat	5,10		5,10	
58	104		Kantor Camat - Berkat	5,90		5,90	
TOTAL PANJANG JALAN PROVINSI				<b>1525,20</b>	1097,5	342,90	84,83

Adapun dalam penyusunan RTRW tersebut, telah mempertimbangkan isu-isu pembangunan berkelanjutan serta analisis terhadap kebijakan/rencana/program yang memiliki pengaruh terhadap isu pembangunan berkelanjutan prioritas yang termuat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 3. 2 Rencana Pola Ruang Pada RTRW Provinsi Sumatera Barat



### 3.6 Penentuan Isu – Isu Strategis

Penentuan Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dilakukan berdasarkan faktor-faktor pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan OPD ditinjau dari gambaran pelayanan OPD; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan implikasi KLHS bagi pelayanan OPD; serta disesuaikan dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta peluang dan ancaman yang mungkin terjadi dalam 5 tahun mendatang.

Berdasarkan faktor tersebut diatas, dilakukan skoring terhadap isu-isu yang dihadapi dalam pengelolaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan mempertimbangkan :

- Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran renstra OPD; K/L; serta pencapaian sasaran strategis dalam RPJMD
- Merupakan tugas pokok dan fungsi pelayanan OPD
- Berdampak besar pada publik
- Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah
- Kemudahan untuk menangani
- Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan pertimbangan pembobotan tersebut, ada beberapa isu strategis dalam pengelolaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, sebagai berikut :

- Persentase kemandapan jalan provinsi Tahun 2020 sebesar 73,92. Nilai ini dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu 74%;
- Belum selesainya proses rekonstruksi dan pembangunan sejumlah gedung pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, beberapa bangunan strategis, rumah negara dan tempat evakuasi sementara (shelter). Perkembangan teknologi bangunan yang semakin maju memungkinkan penerapan bangunan ramah gempa sebagai bentuk antisipasi atas ancaman gempa bumi;
- Sebagaimana menjadi target dalam universal access, target capaian nasional untuk air minum dan rumah tangga bersanitasi masing-masing adalah 100%. Wilayah Sumatera Barat sendiri secara umum baru dapat mengakses layanan air minum pada tahun 2020 sebesar 80,04% dan rumah tangga bersanitasi sebesar 81,68% ;
- Perkembangan pembangunan di Sumatera Barat serta adanya program Nawacita mengakibatkan terjadinya dinamika pembangunan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat yang tidak terakomodir di dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota;
- Penuntasan jalan tol menjadi strategis dalam membangun koneksi Sumatera Barat ke jaringan tol trans sumatera. Kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan menuju akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan. Peningkatan infrastruktur ini dapat meningkatkan efisiensi biaya logistik yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil pertanian. Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata menjadi strategis dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata sekaligus menggerakkan sektor perekonomian;
- Penuntasan pembangunan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi seperti Gedung Stadion Utama dan Gedung Kebudayaan serta penuntasan bangunan evakuasi sementara (shelter) pada daerah kabupaten /kota yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, antara lain; Shelter Maligi (Kabupaten Pasaman Barat), Shelter Sasak Ranah Pasisia (Kabupaten Pasaman Barat), Shelter MTSs Darul Hikmah Sikilang (Kabupaten Pasaman Barat), Shelter SDN No. 12 Ulakan Tapakis (Kabupaten Padang Pariaman), menjadi penting untuk diselesaikan.

Isu penting lainnya yang perlu mendapat perhatian :

- Konektivitas, pemerataan antar daerah dan integrasi sistem transportasi;
- Infrastruktur untuk pengurangan risiko bencana dan pengembangan ketangguhan bencana berbasis komunitas;
- Meningkatnya produksi timbulan sampah membutuhkan respon terhadap penambahan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pengelolaan persampahan khususnya pengembangan pembangunan TPA Regional serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
- Infrastruktur pelayanan dasar seperti pengembangan/pembangunan SPAM Regional dan IPLT Regional;
- Penataan bangunan dan lingkungannya di kawasan strategis.

Isu Regional antar Kabupaten/Kota antara lain :

- Peningkatan Konektivitas/Aksesibilitas jalan dan jembatan antar kabupaten kota dan provinsi tetangga.
- Peningkatan jalan dan jembatan lintas pantai barat Sumatera dari Kabupaten Pasaman Barat sampai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Peningkatan jalan dan jembatan Padang Koto Gadang-Palembayan-Matur Agam.
- Peningkatan ruas jalan dan jembatan Palupuh-Pua gadih-Koto Tinggi.
- Peningkatan Jalan dan jembatan Teluk Bayur-Nipah-Purus & Purus BIM yang menghubungkan simpul transportasi yaitu pelabuhan teluk Bayur dan BIM.
- Peningkatan jalan dan jembatan Simpang Duku (Ketaping) – Pariaman sebagai jalan alternatif dari Padang menuju Padang Pariaman/Agam/Pasaman/Pasaman Barat.
- Peningkatan Jalan dan jembatan Pasar Baru – Alahan Panjang – Tigo Lurah (Gerabak Data ) – Kiliran Jao yang menghubungkan daerah Kab Pessel, Solok, Sijunjung.
- Pembangunan jalan dan jembatan Kambang – Muara Labuh yang menghubungkan daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan. (Catatan : perlu dibicarakan pada rapat pansus dan pemda dikarenakan tidak sesuai RTRW dan melewati zona inti TNKS)

- Peningkatan Jalan dan jembatan Padang Simpang Aro- Lubuk Malako, Lubuk Malako-Abai Sangir dan Abai Sangir-Sungai Dareh.
- Peningkatan jalan dan jembatan Tapus - Muaro Sungai Lolo – Gelugur yang menghubungkan Kabupaten Pasaman menuju Kabupaten 50 Kota.
- Rekonstruksi Jalan dan jembatan Batas Kota Payakumbuh-Sitangkai (melewati Lintau, Kabupaten Tanah Datar).
- Peningkatan Jalan dan jembatan Guguk Cino-Sawahlunto (Lapangan Segitiga), Batas Batusangkar (Bukit Gombak)-Guguk Cino, Baso-Batas Batusangkar (Balai Selasa) untuk pengembangan integrasi wisata sejarah tambang (Kota Sawahlunto) dengan wisata budaya (Istana Pagaruyung).
- Peningkatan Jalan dan jembatan Simpang SP II-Kantor Camat dan jalan Kantor Camat-Berkat, sebagai jalan penghubung daerah terluar di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Pembangunan jalan dan jembatan Suliki-Bonjol.
- Pengembangan kawasan wisata geopark juga dapat diintegrasikan antara Geopark Sawahlunto dengan Kawasan Geopark Silokek (Kab. Sijunjung).
- Penanganan terpadu danau prioritas nasional (Danau Maninjau dan Danau Singkarak).

Isu Regional antar Provinsi yang berbatasan :

- Peningkatan Jalan dan jembatan Bungo Tanjung - Teluk Tapang yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara. Pemanfaatan bersama Pelabuhan Teluk Tapang untuk ekspor hasil perkebunan Provinsi Sumatera Utara bagian selatan khususnya kabupaten Mandahiling Natal.
- Peningkatan Jalan dan jembatan Rao Rokan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau, sebagai alternatif penghubung Jalan antar provinsi dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat menuju Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
- Peningkatan Jalan dan jembatan Pangkalan Koto Baru - Sialang Gelugur (Tanjung Jajaran) sebagai alternatif jalan penghubung lintas provinsi dari Kabupaten 50 Kota, Sumbar menuju Kab Rokan Hulu, Riau.

- Mendorong konektivitas Pulau Sumatera melalui pembangunan feeder (jalan penghubung) antara jalan lintas timur Pulau Sumatera (Selat Malaka), dan Jalan lintas barat Sumatera (Samudera Hindia), terutama pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru.
- Peningkatan jalan dan jembatan dari Rao Kabupaten Pasaman, Sumbar menuju Padang Lawas, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara untuk mendukung peningkatan ekonomi dan pariwisata.
- Peningkatan Jalan dan jembatan Simpang Dingin Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat menuju - Simpang Banyak Kabupaten Madina Sumatera Utara.
- Pembangunan jalan dan jembatan exit tol Kabupaten Dharmasraya masuk kedalam jalan tol Pekanbaru – Palembang di Kabupaten Kuansing, Riau.
- Pembukaan Akses Jalan dan jembatan Buluh Kasok Kabupaten 50 Kota menuju ke Lipek Kain Kabupaten Kampar, Riau.
- Pembangunan Jalan dan jembatan Tanjung Balik Kabupaten 50 Kota menuju Balung, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

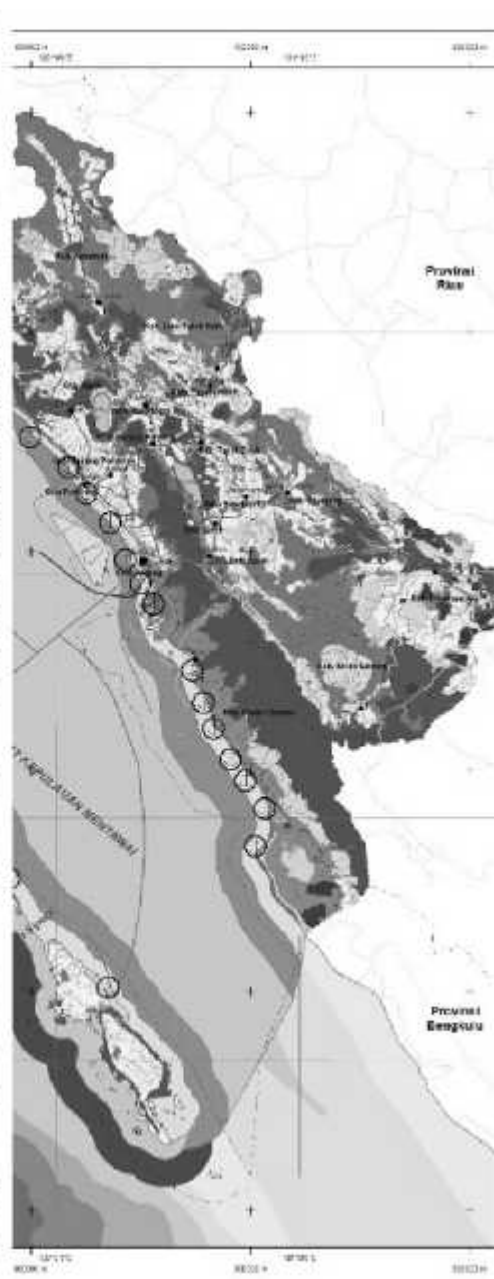
Perlu kerjasama dan sinkronisasi penetapan kawasan perbatasan secara tata ruang dan kajian peruntukan kawasan dimana di Kabupaten Pasaman Barat sebahagian besar.

# BAB IV

# TUJUAN DAN SASARAN

---

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang**

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai.

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera memiliki 4 (empat) tujuan yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kinerja organisasi melalui tata kelola Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang yang baik, bersih, dan profesional;
- 2) Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah;
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Gedung Strategis dan Penataan Bangunan;
- 4) Mewujudkan Penataan Ruang yang baik dan berkelanjutan.

Adapun sasaran yang perlu dicapai demi tercapainya tujuan tersebut antara lain :

- 1) Meningkatnya tata kelola organisasi

Adapun tata kelola organisasi Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan, dan pengawasan internal organisasi.

- 2) Meningkatnya Infrastruktur Kawasan Strategis

3) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Antar Wilayah Kabupaten/Kota.

Salah satu indikator dalam tercapainya konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah meningkatnya kemantapan jalan. Kemantapan jalan merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik dan layanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

4) Meningkatnya Ketersediaan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis

Adapun prasarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan meliputi penyediaan Bangunan Gedung Pemerintah, Rumah Negara dan Bangunan Strategis Lainnya yang aman dan nyaman serta untuk meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi .

5) Meningkatnya Infrastruktur Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Regional

6) Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Penataan Ruang.

Tercapainya kinerja penataan ruang yang tinggi seperti yang diatur dalam UU No 9 Tahun 2015 dan UU No. 26 Tahun 2007.



Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi SAKIP	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Aset	Meningkatnya pengelolaan BMD	Jumlah aset yang diadakan, dipelihara, dan dihapuskan	60%	64%	68%	72%	76%	80%
2	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Kemantapan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya infrastruktur kawasan strategis</li> <li>Meningkatnya kualitas infrastruktur antar wilayah kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panjang jalan yang terkoneksi ke kawasan strategis (Km)</li> <li>Panjang jalan berkondisi baik dan sedang (Km)</li> </ul>	73.92%	75%	77%	79%	81%	82%
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar,	Akses Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Infrastruktur Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Regional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah SPAM Regional terbangun (unit)</li> <li>Jumlah TPA Regional terbangun (lokasi)</li> <li>Jumlah IPLT Regional terbangun (unit)</li> <li>Panjang Drainase</li> </ul>	80.04%	82%	84%	86%	88%	90%
		Akses Sanitasi Layak			80.04%	82%	84%	86%	88%	90%

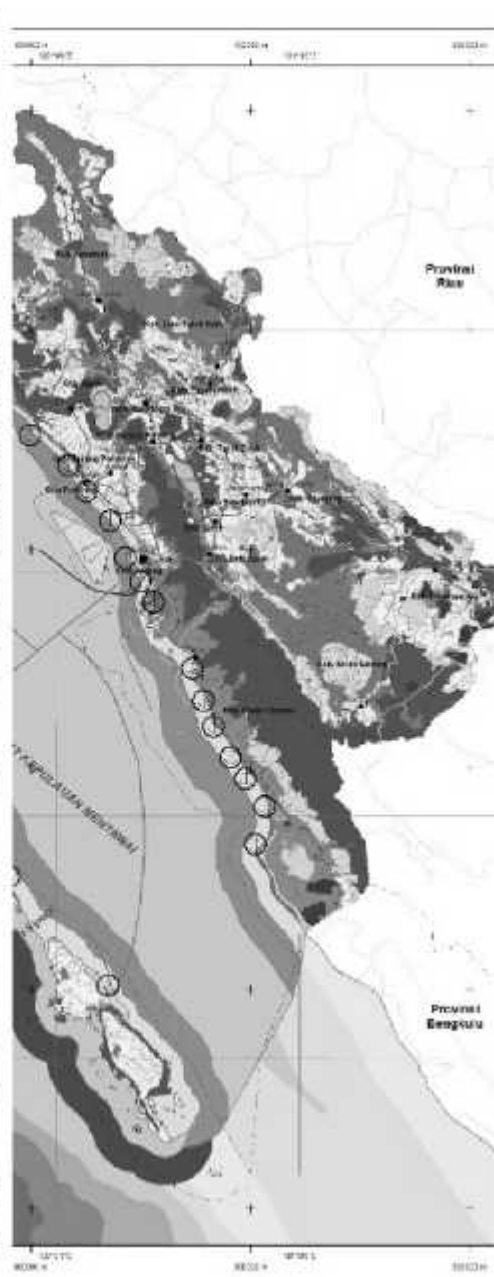
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bangunan strategis dan penataan bangunan			Primer terbangun (Km)						
		Persentase bangunan strategis terbangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Ketersediaan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah bangunan gedung strategis terbangun (unit)</li> <li>Jumlah kawasan strategis yang tertata (Kws)</li> </ul>	38.05%	40.22%	55.55%	66.67%	83.33%	100%
		Persentase penataan bangunan pada kawasan strategis			NA	20%	40%	60%	80%	100%
4	Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah produk Rencana Tata ruang yang dilegalisasi (dokumen)</li> <li>Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)</li> </ul>	84%	86%	87%	88%	89%	90%

# BAB V

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

---

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026



**RENCANA STRATEGIS  
DINAS BINA MARGA  
CIPTA KARYA DAN  
TATA RUANG PROV.  
SUMATERA BARAT  
TAHUN 2021 - 2026**

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. 1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>VISI : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan</b>			
<b>MISI 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Tewujudnya Infrastruktur yang handal dan merata</b>	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Terintegrasi	1. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	1. Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi 2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan dan jembatan Provinsi
		2. Percepatan pengembangan Infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada sektor strategis	3. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur jalan baru dan jalan lama termasuk lintas pantai barat sumatera barat, sesuai master plan yang telah ada dan interkoneksi dan koneksi antar daerah
		3. Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional	4. Meningkatnya dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional
	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	1. Melaksanakan pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Gedung Strategis dan Penataan Bangunan	1. Pembangunan gedung untuk kepentingan strategis 2. Penataan bangunan dan lingkungan 3. Pembangunan SPAM Regional 4. Pembangunan dan pengelolaan TPA Regional 5. Pembangunan Drainase primer 6. Pembangunan IPLT Regional
Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang	1. Tersusunnya Rencana Tata Ruang yang berkualitas	1. Penyusunan RTR Provinsi dan fasilitasi penyusunan RRTR Kab/Kota 2. Pembinaan perencanaan tata ruang	

**VISI : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan**

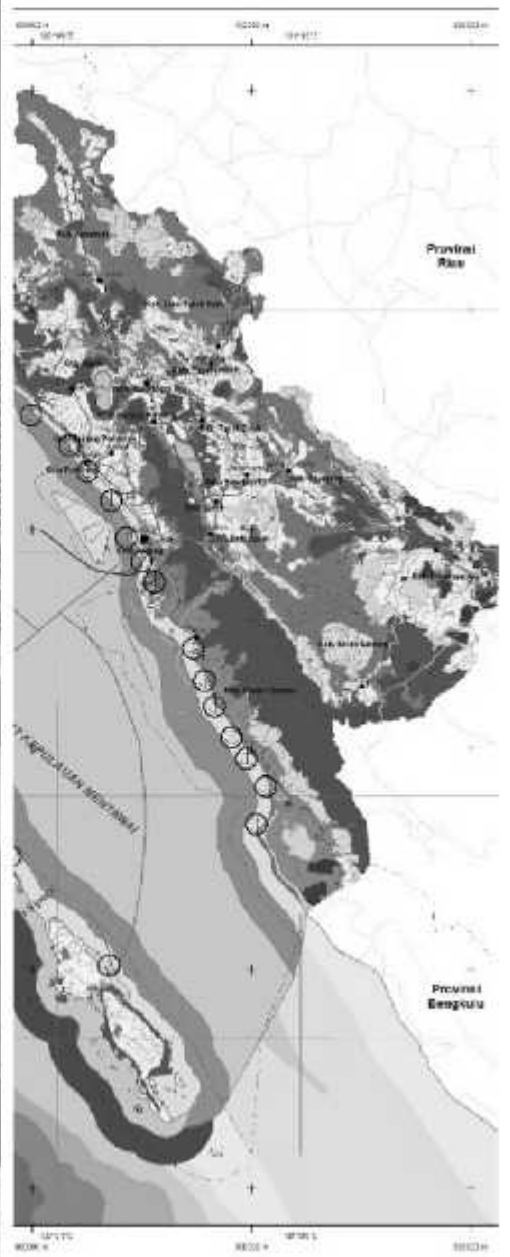
**MISI 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	yang baik dan berkelanjutan	2. Terlaksananya sinkronisasi rencana pembangunan dengan program penataan ruang	1. Pengendalian pemanfaatan ruang 2. Penyusunan regulasi RTR tingkat provinsi (Perda, Pergub) 3. Penyebaran informasi perencanaan tata ruang 4. Peningkatan pengelolaan penggunaan tanah yang sesuai dengan RTRW

# BAB VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026



## BAB VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang

Untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur dengan mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai perwujudan realisasi capaian renstra 2021 - 2026 dilandasi dengan Indikator Kinerja maka dilakukan penyusunan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif Pendanaan sebagai berikut:



**Tabel 6. 1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat**

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2021 (DPA AWAL)		2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			Target	Rp. (Jt)
							412,729,269,318		269,027,305,842		322,832,767,010		387,399,320,412		464,879,184,495		557,855,021,394		557,855,021,394			
I	Meningkatkan akuntabilitas kinerja untuk menunjang pengelolaan SDA	Meningkatnya kinerja layanan pengelolaan SDA	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		27,770,616,248		41,028,497,081		49,234,196,497		59,081,035,797		70,897,242,956		85,076,691,547		85,076,691,547			
I.1			1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat		9 Dokumen	287,167,895	15 Dokumen	391,809,000	15 Dokumen	470,170,800	15 Dokumen	564,204,960	15 Dokumen	677,045,952	15 Dokumen	812,455,142	15 Dokumen	812,455,142	Sekretariat	
I.2			1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang		336 orang, 13 laporan	19,400,972,899	12 bulan, 350 orang	31,457,688,081	12 bulan, 350 orang	37,749,225,697	12 bulan, 350 orang	45,299,070,837	12 bulan, 350 orang	54,358,885,004	12 bulan, 350 orang	65,230,662,005	12 bulan, 350 orang	65,230,662,005	Sekretariat	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2021 (DPA AWAL)		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir 2026	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			Target	Rp. (Jt)
1.3			1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD dengan Baik		7 bulan	166,925,500	1 laporan, 1 dokumen	250,000,000	1 laporan, 1 dokumen	300,000,000	1 laporan, 1 dokumen	360,000,000	1 laporan, 1 dokumen	432,000,000	1 laporan, 1 dokumen	518,400,000	1 laporan, 1 dokumen	518,400,000	Sekretariat	
1.5			1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang		355 stel. 5 orang	316,504,250	360 stel, 20 kali	280,000,000	360 stel, 20 kali	336,000,000	360 stel, 20 kali	403,200,000	360 stel, 20 kali	483,840,000	360 stel, 20 kali	580,608,000	360 stel, 20 kali	580,608,000	Sekretariat	
1.6			1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang		7 bulan, 12 bulan, 3 jenis	1,165,446,447	1 dinas, 12 bulan, 2 set, 12 dokumen, 1 arsip, 2 orang	1,251,000,000	12 bulan	1,501,200,000	12 bulan	1,801,440,000	12 bulan	2,161,728,000	12 bulan	2,594,073,600	12 bulan	2,594,073,600	Sekretariat	
1.7			1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang		44 unit	157,446,800	15 set Kursi dan Meja Kerja Pelaksana, 15 unit lemari arsip, 8 set cctv, 5 unit komputer, 2 unit pdf scanner, 5 unit	400,000,000	12 bulan	480,000,000	12 bulan	576,000,000	12 bulan	691,200,000	12 bulan	829,440,000	12 bulan	829,440,000	Sekretariat	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2021 (DPA AWAL)		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir 2026	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			Target	Rp. (Jt)
								printer														
I.8			1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang		7 bulan, 8 bulan	3,252,941,972	12 bulan	5,113,876,000	12 bulan	6,136,651,200	12 bulan	7,363,981,440	12 bulan	8,836,777,728	12 bulan	10,604,133,274	12 bulan	10,604,133,274	Sekretariat	
I.9			1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang		15 unit, 1 unit, 1 unit, 7 bulan	3,023,210,485	20 unit, 13 unit, 1 paket, 1 unit, 1 unit	1,884,124,000	20 unit, 13 unit, 1 paket, 1 unit, 1 unit	2,260,948,800	20 unit, 13 unit, 1 paket, 1 unit, 1 unit	2,713,138,560	20 unit, 13 unit, 1 paket, 1 unit, 1 unit	3,255,766,272	20 unit, 13 unit, 1 paket, 1 unit, 1 unit	3,906,919,526	20 unit, 13 unit, 1 paket, 1 unit, 1 unit	3,906,919,526	Sekretariat	
II			1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum			477,545,250		1,950,000,000		2,340,000,000		2,808,000,000		3,369,600,000		4,043,520,000		4,043,520,000		
II.1		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Instalasi Jaringan Air Minum		1 lokasi, 1 laporan	477,545,250	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	1,950,000,000	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	2,340,000,000	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	2,808,000,000	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	3,369,600,000	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	4,043,520,000	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	4,043,520,000	BIDANG CIPTA KARYA	
III			1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Terlaksananya pembangunan TPA Regional			1,911,650,700		600,200,000		720,240,000		864,288,000		1,037,145,600		1,244,574,720		1,244,574,720		

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2021 (DPA AWAL)		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir 2026	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			Target	Rp. (Jt)
III.1		Meningkatnya Pengelolaan TPA Regional	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan TPA Sampah Regional		1 lokasi	1,911,650,700	2 lokasi, 4 TPA	600,200,000	2 lokasi, 4 TPA	720,240,000	2 lokasi, 4 TPA	864,288,000	2 lokasi, 4 TPA	1,037,145,600	2 lokasi, 4 TPA	1,244,574,720	2 lokasi, 4 TPA	1,244,574,720	BIDANG CIPTA KARYA	
IV			1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional			321,022,840		200,000,000		240,000,000		288,000,000		345,600,000		414,720,000		414,720,000		
IV.1		Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Terfasilitasinya Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP)		1 laporan 19 kab/kota	321,022,840	1 laporan 19 kab/kota	200,000,000	1 laporan 19 kab/kota	240,000,000	1 laporan 19 kab/kota	288,000,000	1 laporan 19 kab/kota	345,600,000	1 laporan 19 kab/kota	414,720,000	1 laporan 19 kab/kota	414,720,000	BIDANG CIPTA KARYA	
V			1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Terlaksananya pembangunan drainase primer			6,547,654,030		1,290,100,000		1,548,120,000		1,857,744,000		2,229,292,800		2,675,151,360		2,675,151,360		
V.1		Terkelolanya dan Berkembangnya Sistem Drainase Primer	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Terlaksananya pembangunan drainase primer		1 laporan, 1.565,72 meter	6,547,654,030	3.450 m, 3 dokumen	1,290,100,000	3.450 m, 3 dokumen	1,548,120,000	3.450 m, 3 dokumen	1,857,744,000	3.450 m, 3 dokumen	2,229,292,800	3.450 m, 3 dokumen	2,675,151,360	3.450 m, 3 dokumen	2,675,151,360	BIDANG CIPTA KARYA	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2021 (DPA AWAL)		2022		2023		2024		2025					2026	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
VI	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Gedung Strategis dan Penataan Bangunan	Meningkatnya Ketersediaan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terlaksananya pembangunan Bangunan Gedung		132,125,605,503		22,209,337,000		26,651,204,400		31,981,445,280		38,377,734,336		46,053,281,203		46,053,281,203		
VI.1	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Gedung Strategis dan Penataan Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Yang Terbangun	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi <i>(Sub Kegiatan : Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi)</i>	Terselenggaranya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan Bangunan gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1 dokumen, 4 unit, 74,5 meter, 85 meter, 0,01333 ha	132,125,605,503	3 unit	21,900,400,000	3 unit	26,280,480,000	3 unit	31,536,576,000	3 unit	37,843,891,200	3 unit	45,412,669,440	3 unit	45,412,669,440	BIDANG CIPTA KARYA	
VI.2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Yang	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Terselenggaranya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan Bangunan gedung untuk Kepentingan		-	1 laporan	208,937,000	1 laporan	250,724,400	1 laporan	300,869,280	1 laporan	361,043,136	1 laporan	433,251,763	1 laporan	433,251,763	UPTD Pengawasan dan Pengendalian Banguna	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2021 (DPA AWAL)		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir 2026	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			Target	Rp. (Jt)
	ktur Pelayanan Dasar, Bangunan Gedung Strategis dan Penataan Bangunan	Terbangun		Provinsi (Sub Kegiatan : Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi)	Strategis Daerah Provinsi															n		
VI.3	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Gedung Strategis dan Penataan Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Yang Terbangun	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Sub kegiatan : Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara)	Terselenggaranya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan Bangunan gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			1 laporan	100,000,000	1 laporan	120,000,000	1 laporan	144,000,000	1 laporan	172,800,000	1 laporan	207,360,000	1 laporan	207,360,000			
VII			1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN YA	Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan				1,404,882,383		1,491,063,000		1,789,275,600		2,147,130,720		2,576,556,864		3,091,868,237		3,091,868,237	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2021 (DPA AWAL)		2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				
VII.1		Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Yang Terbangun	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kotora <i>(Sub kegiatan : Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan)</i>	Terlaksananya Pengendalian Kegiatan Keciptakarya di Provinsi Sumatera		13 laporan	635,345,600	13 laporan	700,000,000	13 laporan	840,000,000	13 laporan	1,008,000,000	13 laporan	1,209,600,000	13 laporan	1,451,520,000	13 laporan	1,451,520,000	BIDANG CIPTA KARYA	
VII.2		Bangunan Gedung Pemerintah Yang Terbangun	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kotora	Terdapatnya penanganan masalah teknis keciptakarya		25 laporan, 4 kegiatan	769,536,783	3 laporan	791,063,000	3 laporan	949,275,600	3 laporan	1,139,130,720	3 laporan	1,366,956,864	3 laporan	1,640,348,237	3 laporan	1,640,348,237	UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	
VII.1	Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang terintegrasi	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN	Rasio kemantapan jalan			240,384,991,474		197,708,108,761		237,249,730,513		284,699,676,616		341,639,611,939		409,967,534,327		409,967,534,327		
VII.1.1		Persentase Pengelolaan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi		16 laporan,	202,173,381,994	44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25	151,926,358,761	44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25	182,311,630,513	44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25	218,773,956,616	44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25	262,528,747,939	44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25	315,034,497,527	44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25	315,034,497,527	BIDANG BINA MARGA	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2021 (DPA AWAL)		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir 2026	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			Target	Rp. (Jt)
								ha, 2 doku men, 2 doku men, 8 ruas, 2 ruas, 1 doku men, 1 doku men, 16 ruas, 1 doku men, 11 ruas, 1 doku men, 555 meter		ha, 2 doku men, 2 doku men, 8 ruas, 2 ruas, 1 doku men, 1 doku men, 16 ruas, 1 doku men, 11 ruas, 1 doku men, 555 meter		ha, 2 doku men, 2 doku men, 8 ruas, 2 ruas, 1 doku men, 1 doku men, 16 ruas, 1 doku men, 11 ruas, 1 doku men, 555 meter		ha, 2 doku men, 2 doku men, 8 ruas, 2 ruas, 1 doku men, 1 doku men, 16 ruas, 1 doku men, 11 ruas, 1 doku men, 555 meter		ha, 2 doku men, 2 doku men, 8 ruas, 2 ruas, 1 doku men, 1 doku men, 16 ruas, 1 doku men, 11 ruas, 1 doku men, 555 meter		ha, 2 doku men, 2 doku men, 8 ruas, 2 ruas, 1 doku men, 1 doku men, 16 ruas, 1 doku men, 11 ruas, 1 doku men, 555 meter				
							1,162,304,160		1,500,000,000		1,800,000,000		2,160,000,000		2,592,000,000		3,110,400,000		3,110,400,000			
VII 1.2		Persentase Pengelolaan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		9 laporan, 7 unit, 10 unit	15 unit, 13 laporan, 10 unit	1,500,000,000	15 unit, 13 laporan, 10 unit	1,800,000,000	15 unit, 13 laporan, 10 unit	2,160,000,000	15 unit, 13 laporan, 10 unit	2,592,000,000	15 unit, 13 laporan, 10 unit	3,110,400,000	15 unit, 13 laporan, 10 unit	3,110,400,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi		
							3,303,420,997		3,000,000,000		3,600,000,000		4,320,000,000		5,184,000,000		6,220,800,000		7,600,000,000			



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2021 (DPA AWAL)		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir 2026	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			Target	Rp. (Jt)
VII 1.3		Persentase Pengelolaan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terkelola dan terpeliharanya Peralatan Jalan dan Jembatan		10 unit, 2 unit dan 1 tahun	3,303,420,997	30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 6 unit, 1 unit, 1 unit	3,000,000,000	30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 6 unit, 1 unit	3,600,000,000	30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 6 unit, 1 unit	4,320,000,000	30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 6 unit, 1 unit	5,184,000,000	30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 6 unit, 1 unit	6,220,800,000	30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 6 unit, 1 unit	7,600,000,000	UPTD Workshop dan Peralatan	
VII 1.4	Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang terintegrasi	1.03.10		Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan/ Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Provinsi			33,745,884,323		41,281,750,000		49,538,100,000		59,445,720,000		71,334,864,000		85,601,836,800		85,601,836,800	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I sd VI	
		Persentase Pengelolaan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi		16 ruas, 8 laporan, 1 dokumen	6,626,392,384	1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	8,610,300,000	1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	10,332,360,000	1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	12,398,832,000	1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	14,878,598,400	1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	17,854,318,080	1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	17,854,318,080	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	
VII 1.5		Persentase Pengelolaan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi		10 ruas, 8 laporan, 1 dokumen	6,575,876,197	2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	8,732,000,000	2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	10,478,400,000	2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	12,574,080,000	2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	15,088,896,000	2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	18,106,675,200	2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	18,106,675,200	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2021 (DPA AWAL)		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir 2026	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			Target	Rp. (Jt)
VII 1.6		Persentase Pengelolaan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi		6 ruas, 8 laporan, 1 dokumen	5,042,833,595	2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	6,939,390,000	2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	8,327,268,000	2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	9,992,721,600	2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	11,991,265,920	2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	14,389,519,104	2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	14,389,519,104	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	
VII 1.7		Persentase Pengelolaan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi		8 ruas, 8 laporan, 1 dokumen	5,540,700,469	2 dokumen, 133,7 km, 87 km	6,229,100,000	2 dokumen, 133,7 km, 87 km	7,474,920,000	2 dokumen, 133,7 km, 87 km	8,969,904,000	2 dokumen, 133,7 km, 87 km	10,763,884,800	2 dokumen, 133,7 km, 87 km	12,916,661,760	2 dokumen, 133,7 km, 87 km	12,916,661,760	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	
VII 1.8		Persentase Pengelolaan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi		12 ruas, 8 laporan, 1 dokumen	4,335,150,102	1 dokumen, 58,9 km, 118,98 km	6,230,040,000	1 dokumen, 58,9 km, 118,98 km	7,476,048,000	1 dokumen, 58,9 km, 118,98 km	8,971,257,600	1 dokumen, 58,9 km, 118,98 km	10,765,509,120	1 dokumen, 58,9 km, 118,98 km	12,918,610,944	1 dokumen, 58,9 km, 118,98 km	12,918,610,944	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	
VII 1.9		Persentase Pengelolaan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi		12 ruas, 8 laporan, 1 dokumen	5,624,931,576	2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	4,540,920,000	2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	5,449,104,000	2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	6,538,924,800	2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	7,846,709,760	2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	9,416,051,712	2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	9,416,051,712	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	
IX	Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang baik dan berkelanjutan	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Penyusunan RTR Provinsi dan Fasilitasi Penyusunan RTR Kabupaten/Kota			1,785,300,890		2,550,000,000		3,060,000,000		3,672,000,000		4,406,400,000		5,287,680,000		5,287,680,000		

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2021 (DPA AWAL)		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir 2026	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			Target	Rp. (Jt)
IX. 1	Mewujudkan Penataan Ruang yang baik dan berkelanjutan	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Penataan Ruang	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Terlaksananya persetujuan substansi dan penetapan Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat		2 Dokumen	312,758,120	1 Perda	400,000,000	1 Perda	480,000,000	1 Perda	576,000,000	1 Perda	691,200,000	1 Perda	829,440,000	1 Perda	829,440,000	BIDANG TATA RUANG	
IX. 2	Mewujudkan Penataan Ruang yang baik dan berkelanjutan	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Penataan Ruang	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		4 ranperda, 2 dokumen	340,406,552	1 laporan	700,000,000	3 laporan	840,000,000	3 laporan	1,008,000,000	3 laporan	1,209,600,000	3 laporan	1,451,520,000	3 laporan	1,451,520,000	BIDANG TATA RUANG	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2021 (DPA AWAL)		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (Jt)		
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				
IX.3	Mewujudkan Penataan Ruang yang baik dan berkelanjutan	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Penataan Ruang	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		2 dokumen, 1 perangkat	473,465,891	1 laporan	700,000,000	16 dokumen, 5 kali	840,000,000	16 dokumen, 5 kali	1,008,000,000	16 dokumen, 5 kali	1,209,600,000	16 dokumen, 5 kali	1,451,520,000	16 dokumen, 5 kali	1,451,520,000	BIDANG TATA RUANG	
IX.4	Mewujudkan Penataan Ruang yang baik dan berkelanjutan	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Penataan Ruang	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		2 Dokumen	658,670,327	1 laporan	750,000,000	1 laporan	900,000,000	1 laporan	1,080,000,000	1 laporan	1,296,000,000	1 laporan	1,555,200,000	1 laporan	1,555,200,000	BIDANG TATA RUANG	

## 6.2. Indikator Kinerja

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Target indikator kinerja pada Renstra Tahun 2021 – 2026 ditetapkan menyesuaikan dengan prioritas, sumber daya manusia serta kemampuan anggaran yang tersedia. Berikut uraian target indikator kinerja sasaran Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat :

- a) Panjang jalan yang terkoneksi ke kawasan strategis (km)
- b) Panjang jalan berkondisi baik dan sedang (mantap)

Panjang jalan berkondisi baik dan sedang (mantap) dapat dijadikan sebagai gambaran mengenai kondisi minimal dari suatu ruas jalan yg diharapkan dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kemantapan jalan adalah :

- Kondisi jalan (Baik / sedang / rusak ringan / rusak berat )
- Parameter kapasitas dan volume jalan ( macet / tidak macet )
- Parameter lebar jalan ( standar minimal lebar jalan )

Adapun baseline kondisi kemantapan jalan provinsi pada Tahun 2020 adalah 73,92%. Namun pada tahun 2021 ini akan ada perubahan SK mengenai Ruas Jalan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini nantinya tentu akan berpengaruh terhadap nilai capaian kemantapan jalan Provinsi pada tahun 2021 dan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

- c) Jumlah Bangunan Gedung Strategis Terbangun (Unit)
- d) Jumlah Kawasan Strategis yang Tertata (Kws)
- e) Jumlah SPAM Regional Terbangun (Unit)
- f) Jumlah TPA Regional Terbangun (Lokasi)
- g) Jumlah IPLT Regional Terbangun (Unit)
- h) Panjang Drainase Primer terbangun (Km)
- i) Jumlah produk Rencana Tata Ruang yang dilegalisasi (Dokumen)
- j) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)

### 6.3. Pendanaan Indikatif

Dalam proses penyusunan program, kegiatan, lokasi dan pendanaan indikatif yang termuat dalam Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan evaluasi kinerja Renstra Tahun 2016 – 2020. Proyeksi kebutuhan dan target yang akan dicapai, serta skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun program dan kegiatan bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan perubahan yang terjadi selama tahun pelaksanaan Renstra.

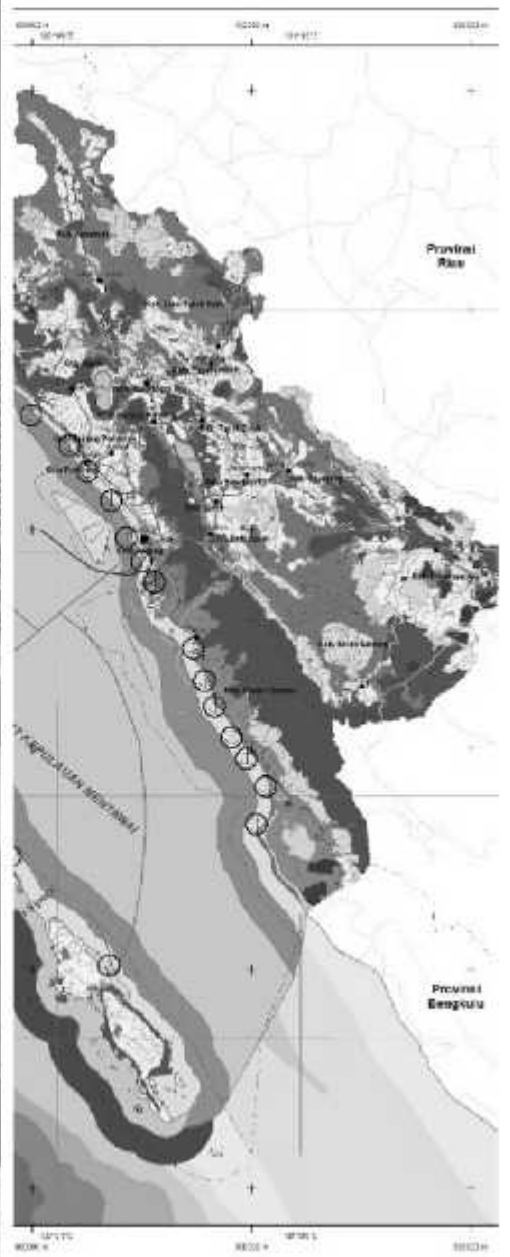
Dalam pelaksanaannya, pendanaan dalam kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang bersumber dari alokasi dana APBD, APBN dan PHLN. Secara lebih lengkap program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

# BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

---

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026



**RENCANA STRATEGIS  
DINAS BINA MARGA  
CIPTA KARYA DAN TATA  
RUANG PROV.  
SUMATERA BARAT  
TAHUN 2016 - 2021**

## **BAB VII**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja OPD menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021- 2026 adalah sebagaimana pada tabel 7.1.



Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

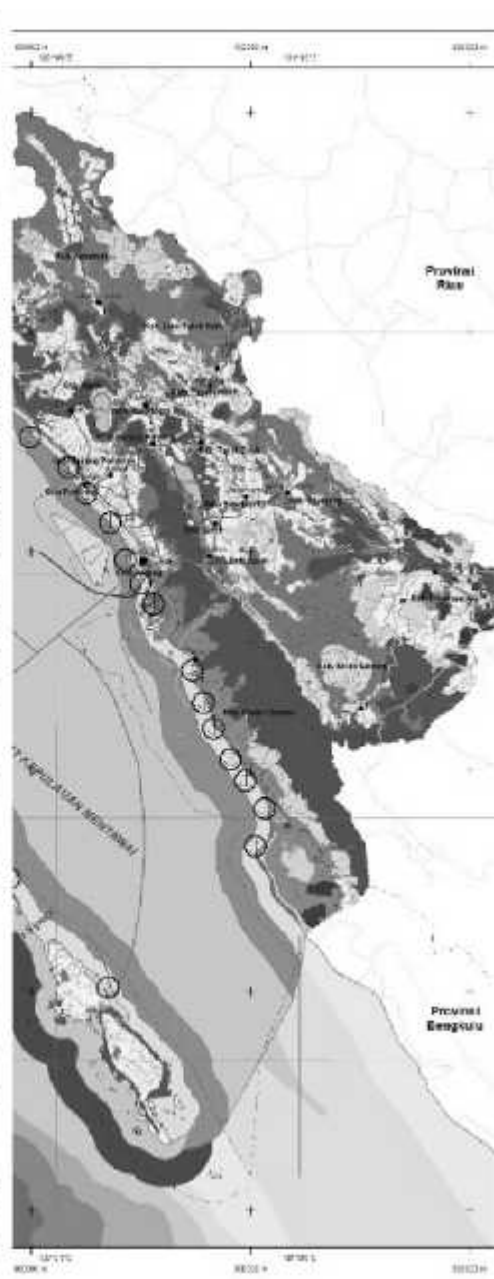
No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2	Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Aset	60%	64%	68%	72%	76%	80%	80%
3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	73.92%	75%	77%	79%	81%	82%	82%
4	Akses Air Minum Layak	80.04%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
5	Akses Sanitasi Layak	80.04%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
6	Persentase bangunan strategis terbangun	38.05%	40.22%	55.55%	66.67%	83.33%	100%	100%
7	Persentase penataan bangunan pada kawasan strategis	NA	20%	40%	60%	80%	100%	100%
8	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	84%	86%	87%	88%	89%	90%	90%

# BAB VIII

# PENUTUP

---

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026



## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana strategis ini adalah Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat serta dijadikan acuan dalam evaluasi dan laporan pelaksanaan Kinerja Tahunan dan Lima Tahunan. Keterpaduan arah dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat dan target – target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun kedepan.

Dokumen ini mencakup jangka waktu rentang tahun 2021 - 2026 sesuai dengan masa kerja Gubernur dan sesuai juga dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026. Dokumen Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahun selama masa periode Renstra dengan tetap memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang termuat dalam RPJP-Daerah 2010-2025 dan kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam RPJM - Nasional maupun dalam Renstra Kementerian PUPR dan Kementerian ATR.

Rencana Strategis ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi infrastruktur yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, meningkatnya cakupan layanan air minum, tersedianya TPA Sampah Regional, keterpaduan antar daerah/wilayah perbatasan Provinsi, menumbuh kembangkan kegiatan

pariwisata sebagai stimulan bagi upaya menciptakan iklim investasi wilayah serta perluasan akses sosial dasar maupun pelayanan administrasi publik lainnya dalam mendukung daya saing Provinsi Sumatera Barat.

Demikian penyusunan dokumen ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan berkah dan petunjuk kita semua, Aamiin Yaa Rabbal Alamin.



## Lampiran 1

No	Indikator di RPJMD	Bangunan Gedung Terbangun Per-tahun					Kondisi Akhir Kinerja pada akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terlaksananya pembangunan Bangunan Gedung	3	7	2	3	2	17
2	Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan	1	1	1	2	3	8

## Keterangan :

**A. Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis****I. Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis pada awal RPJMD (2016 - 2021)**

1. Gedung BAKEUDA
2. Gedung Dinas ESDM
3. Gedung Dinas Ketahanan Pangan
4. Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan
5. Gedung UPTD Koperasi
6. Gedung Bundo Kanduang
7. Gedung Kelautan dan Perikanan
8. Gedung Covention Hall
9. Gedung Samsat
10. Gedung Inflasi (TTIC) Padang

**II. Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis pada awal RPJMD (2021 - 2026)**

1. Shelter Linggarjati, Kota Padang
2. Gedung Main Stadium Sumbar
3. Gedung Kebudayaan
4. Gedung MUI
5. TTIC Pasaman Barat
6. Gedung Limbah B3
7. Amphitheater Ngarai Sianok
8. Amphitheater Gunung Talang
9. Shelter Maligi, Pasaman Barat
10. Shelter Sasak, Pasaman Barat
11. Shelter Tanjung Mutiara, Agam
12. Shelter MTS Darul Hikmah, Pasaman Barat
13. Shelter SDN 12 Ulakan, Padang Pariaman
14. Shelter SLBN 2 Padang, Kota Padang
15. Sumbar Creative Hub
16. Gedung PP IPTEK
17. Gedung Dinas Perkimtan

**III. Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis direncanakan terbangun/ selesai pada tahun 2022 adalah 3, sebagai berikut :**

1. Shelter Linggarjati, Kota Padang (selesai)
2. Shelter Maligi, Pasaman Barat (selesai)
3. Gedung MUI (selesai)
4. Gedung Kebudayaan (Lanjutan)
5. Gedung Main Stadium Sumatera Barat (Lanjutan)
6. Sapra Limbah B3 (Lanjutan)

**IV. Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis direncanakan terbangun/ selesai pada tahun 2023 adalah 7, sebagai berikut :**

1. Amphitheater Ngarai Sianok (selesai)
2. Amphitheater Gunung Talang (selesai)
3. Shelter SDN 12 Ulakan, Padang Pariaman (selesai)
4. Shelter MTS Darul Hikmah, Pasaman Barat (selesai)
5. TTIC Pasaman Barat (selesai)
6. Shelter Tanjung Mutiara, Agam (selesai)
7. Sumbar Creative Hub (selesai)
8. Gedung Limbah B3 (Lanjutan)
9. Gedung Main Stadium Sumatera Barat (Lanjutan)
10. Gedung Kebudayaan (Lanjutan)

**V. Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis direncanakan terbangun/ selesai pada tahun 2024 adalah 2, sebagai berikut :**

1. Shelter Sasak, Pasaman Barat (selesai)
2. Gedung Limbah B3 (selesai)
3. PP IPTEK
4. Gedung Main Stadium Sumatera Barat (Lanjutan)
5. Gedung Kebudayaan (Lanjutan)
6. Shelter SLBN 2 Padang, Kota Padang

**VI. Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis direncanakan terbangun/ selesai pada tahun 2025 adalah 3, sebagai berikut :**

1. PP IPTEK (selesai)
2. Shelter SLBN 2 Padang, Kota Padang (selesai)
3. Gedung Main Stadium Sumatera Barat (selesai)
4. Gedung Dinas Perkimtan
5. Gedung Kebudayaan (Lanjutan)

**VII. Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis direncanakan terbangun/ selesai pada tahun 2026 adalah 2, sebagai berikut :**

1. Gedung Dinas Perkimtan (selesai)
2. Gedung Kebudayaan (selesai)

**B. Kawasan Strategis**

**I. Penataan Bangunan dan lingkungan pada awal RPJMD (2016 - 2021)**

1. Kawasan 1000 Rumah Gadang, Kabupaten Solok Selatan
2. Kawasan Batang Arau, Kota Padang

**II. Penataan Bangunan dan lingkungan pada awal RPJMD (2021 - 2026)**

1. Kawasan Gunung Talang dan Bukit Cambai
2. Kawasan Museum PDRI
3. Kawasan Mesjid Raya Sumbar
4. Kawasan Budaya, Museum dan IPTEK
5. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perbatasan Sumbar dengan Riau
6. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perbatasan Sumbar dengan Sumut
7. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perbatasan Sumbar dengan Jambi
8. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perbatasan Sumbar dengan Bengkulu

**III. Penataan Bangunan dan lingkungan pada tahun 2022 adalah 1, sebagai berikut :**

1. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perbatasan Sumbar dengan Bengkulu (selesai)

**IV. Penataan Bangunan dan lingkungan pada tahun 2023 adalah 1, sebagai berikut :**

1. Kawasan Mesjid Raya (selesai)
2. Kawasan Gunung Talang dan Bukit Cambai (Tahap 1)
3. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perbatasan Sumbar dengan Jambi (Tahap 1)

**V. Penataan Bangunan dan lingkungan pada tahun 2024 adalah 1, sebagai berikut :**

1. Kawasan Gunung Talang dan Bukit Cambai (selesai)
2. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perbatasan Sumbar dengan Riau (Tahap 1)

**VI. Penataan Bangunan dan lingkungan pada tahun 2025 adalah 2, sebagai berikut :**

1. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perbatasan Sumbar dengan Jambi (selesai)
2. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perbatasan Sumbar dengan Riau (selesai)
3. Kawasan Budaya, Museum dan IPTEK (Tahap 1)

**VII. Penataan Bangunan dan lingkungan pada tahun 2026 adalah 3, sebagai berikut :**

1. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perbatasan Sumbar dengan Sumut (selesai)
2. Kawasan Museum PDRI (selesai)
3. Kawasan Budaya, Museum dan IPTEK (selesai)



## Lampiran 2

No	Indikator di RPJMD	SPAM dan TPA Terbangun Per-tahun					Kondisi Akhir Kinerja pada akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	82	84	86	88	90	90
2	Terlaksananya pembangunan TPA Regional	2	3	3	3	3	3

### A. SPAM (Air Minum)

SPAM pada RPJMD 2021 - 2026

1. SPAM Regional Agam - Bukittinggi
2. SPAM Regional Kab. 50 Kota - Kota Payakumbuh
3. SPAM Regional Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Kota Padang
4. SPAM Regional Kab. Solok dan Kota Solok

### B. TPA

I. TPA pada awal RPJMD 2016 - 2021

1. TPA Regional Payakumbuh
2. TPA Regional Solok

II. TPA pada RPJMD 2021 - 2026

1. Perluasan TPA Regional Payakumbuh (Payakumbuh, Kab. 50 Kota, Kota Bukittinggi, Kab. Agam)
2. Pembangunan TPA Regional Kab. Padang Pariaman (Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang)
3. Pembangunan TPA Regional Kab. Agam (Kab. Agam, Kota Bukittinggi)